



BANK

dan

LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Nurhafiani ▪ D. Muhamad Yamin ▪ Agusdiwana Suarni ▪
Moh. Ery Kusmiadi ▪ Euis Ajizah ▪ Imelda Virgula Wisang ▪
Kartika Novitasari ▪ Siti Mudawanah ▪ Munzir



BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Nurhafiani ■ D. Muhamad Yamin ■ Agusdiwana Suarni ■
Moh. Ery Kusmiadi ■ Euis Ajizah ■ Imelda Virgula Wisang
■ Kartika Novitasari ■ Siti Mudawanah ■ Munzir

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA

PASAL 72
KETENTUAN PIDANA SANKSI PELANGGARAN

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000, (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah).

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Hak Cipta © 2023 pada penulis.

Penulis	. Nurhafiani ■ D. Muhamad Yamin ■ Agusdiwana Suarni ■ Moh. Ery Kusmiadi ■ Euis Ajizah ■ Imelda Virgula Wisang ■ Kartika Novitasari ■ Siti Mudawanah ■ Munzir
Editor	. Tim Penerbit
Setting dan Layout	. Tim Penerbit
Desainer Sampul	. Zaenal Arifin
Cetakan 1	. Maret 2024
Diterbitkan oleh	. CV. Edupedia Publisher
Alamat	. Jl. Trajaya, Palasah, Kab. Majalengka, Jawa Barat Telp/WA. 0822-1856-0919 edupedia.publisher@gmail.com
ISBN	. 978-623-8442-93-5

Anggota IKAPI No. 465/JBA/2023

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit Edupedia Publisher.

© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas terselesainya Buku ini dengan judul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Buku ini menguraikan sejarah, fungsi, struktur, regulasi, jenis-jenis, produk, peran dalam ekonomi global, pengaruh faktor ekonomi, serta aspek etika dan tanggung jawab sosial yang terkait dengan bank dan lembaga keuangan.

Bab I memperkenalkan pembaca pada sejarah perbankan dan lembaga keuangan, mulai dari perkembangan awal sistem keuangan, peran penting perbankan dalam sejarah ekonomi, hingga evolusi lembaga keuangan modern.

Bab II membahas fungsi dan peran utama bank dan lembaga keuangan, termasuk intermediasi keuangan, mobilisasi dana, penyaluran kredit, manajemen risiko keuangan, dan penyediaan layanan keuangan.

Bab III mengulas struktur organisasi bank dan lembaga keuangan, termasuk struktur organisasi internal, pengawasan perbankan, dan fungsi departemen yang ada.

Bab IV fokus pada regulasi dan pengawasan bank dan lembaga keuangan, mencakup peran pemerintah dalam regulasi keuangan, otoritas pengawas keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku.

Bab V menjelaskan jenis-jenis bank dan lembaga keuangan, seperti bank komersial, bank investasi, bank sentral, dan lembaga keuangan non-bank.

Bab VI menguraikan produk dan layanan keuangan yang ditawarkan oleh bank dan lembaga

keuangan, mulai dari simpanan dan tabungan, kredit dan pinjaman, investasi dan manajemen kekayaan, hingga layanan pembayaran dan transaksi.

Bab VII membahas peran bank dan lembaga keuangan dalam ekonomi global, termasuk hubungan antar bank sentral, peran dalam perdagangan internasional, dan dampak krisis keuangan global.

Bab VIII mengeksplorasi pengaruh faktor ekonomi terhadap bank dan lembaga keuangan, seperti siklus ekonomi, inflasi, suku bunga, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Bab IX menyimpulkan dengan membahas etika dan tanggung jawab sosial bank dan lembaga keuangan, termasuk prinsip-prinsip etika bisnis, kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, dan tanggung jawab kepada pemegang saham dan masyarakat secara umum.

Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan buku ini.

Majalengka, Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
Bab I. Sejarah Perbankan dan Lembaga Keuangan	1
A. Perkembangan awal sistem keuangan	1
B. Peran perbankan dalam sejarah ekonomi.....	7
C. Evolusi lembaga keuangan modern.....	10
Bab II. Fungsi dan Peran Utama Bank dan Lembaga Keuangan	16
A. Intermediasi keuangan	16
B. Mobilisasi dana.....	18
C. Penyaluran kredit	20
D. Manajemen risiko keuangan	22
E. Penyediaan layanan keuangan	24
Bab III. Struktur Organisasi Bank dan Lembaga Keuangan	27
A. Struktur organisasi.....	27
B. Pengawasan perbankan	32
C. Fungsi departemen	33
Bab IV. Regulasi dan Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan.....	37
A. Peran pemerintah dalam regulasi keuangan	37
B. Otoritas pengawas keuangan	45
C. Kepatuhan terhadap peraturan dan standar .	49
Bab V. Jenis-jenis Bank dan Lembaga Keuangan	54
A. Bank komersial.....	54
B. Bank investasi	57
C. Bank sentral.....	59
D. Lembaga keuangan non-bank.....	61
Bab VI. Produk dan Layanan Keuangan yang Ditawarkan.....	64
A. Simpanan dan tabungan.....	64
B. Kredit dan pinjaman.....	66

C. Investasi dan manajemen kekayaan	69
D. Layanan pembayaran dan transaksi	73
Bab VII. Peran Bank dan Lembaga Keuangan dalam Ekonomi Global.....	76
A. Pendahuluan	76
B. Hubungan antar bank sentral.....	78
C. Peran dalam perdagangan internasional.....	81
D. Krisis keuangan global.....	85
Bab VIII. Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Bank dan Lembaga Keuangan.....	89
A. Siklus ekonomi dan keseimbangan pasar	89
B. Inflasi dan suku bunga	94
C. Pengaruh kebijakan fiskal dan moneter	96
Bab IX. Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bank dan Lembaga Keuangan.....	99
A. Prinsip-prinsip etika bisnis.....	99
B. Kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.....	105
C. Tanggung jawab kepada pemegang saham dan masyarakat.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	111
BIOGRAFI PENULIS.....	125

BAB I

Sejarah Perbankan dan Lembaga Keuangan

A. Perkembangan Awal Sistem Keuangan

Sejarah awal sistem keuangan melibatkan evolusi cara manusia melakukan pertukaran barang dan nilai mata uang. Pada periode awal, masyarakat mengandalkan sistem barter sebagai bentuk pertukaran, dimana barang digunakan langsung sebagai alat tukar. Namun, keterbatasan sistem barter mendorong munculnya konsep uang komoditas.

Uang komoditas, seperti emas dan perak, mulai digunakan sebagai medium pertukaran yang lebih efisien dan mudah diukur nilainya. Sistem ini memberikan dasar bagi pembentukan nilai yang diterima secara luas dalam perdagangan. Selanjutnya, perkembangan masyarakat dan perdagangan internasional mendorong munculnya praktek perbankan pertama. Praktik ini mencakup penyimpanan barang berharga dan memberikan bukti klaim, yang menjadi awal dari fungsi perbankan sebagai perantara keuangan.

Dengan demikian, sub bab ini akan menguraikan perjalanan dari sistem barter hingga munculnya uang komoditas, serta peran kunci praktek perbankan dalam membentuk fondasi awal sistem keuangan.

Transformasi kompleks dalam cara manusia melakukan pertukaran barang dan nilai sepanjang perjalanan sejarah. Pada fase awal, masyarakat

bergantung pada sistem barter, di mana barang-barang langsung dipertukarkan tanpa menggunakan medium tertentu. Namun, tantangan dalam sistem barter, seperti ketidakseimbangan nilai barang, mendorong masyarakat untuk mencari solusi yang lebih efisien. Inilah munculnya uang komoditas, di mana benda berharga seperti emas dan perak diakui sebagai standar nilai yang dapat digunakan untuk memudahkan pertukaran. Dengan adanya uang komoditas, masyarakat dapat dengan lebih efektif mengukur nilai barang dan menyederhanakan proses perdagangan. Perkembangan ini membawa implikasi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan struktur sosial.

Seiring waktu, peningkatan kompleksitas perdagangan dan kebutuhan akan keamanan keuangan membuka pintu bagi munculnya praktek perbankan. Fungsi perbankan awalnya melibatkan penyimpanan barang berharga dan pemberian bukti klaim, yang menjadi dasar untuk pengembangan sistem perbankan modern.

Pergeseran lanskap keuangan dari pertukaran barang langsung hingga munculnya konsep uang komoditas, serta peran strategis perbankan dalam menggiring evolusi ini menuju fondasi sistem keuangan yang lebih kompleks. Seiring perkembangan uang komoditas, masyarakat mulai mengenali kebutuhan akan lembaga keuangan yang dapat menyediakan layanan yang lebih terstruktur.

Praktek perbankan pertama kali muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan ini. Institusi-institusi awal menyediakan tempat aman untuk menyimpan uang dan barang berharga,

memberikan kemudahan akses, dan menciptakan bukti transaksi. Ini bukan hanya menyederhanakan perdagangan, tetapi juga mengarah pada konsep pertama sistem perbankan yang menjadi pondasi dari sistem perbankan modern.

Perjalanan melalui sub bab ini membuka pintu wawasan tentang bagaimana manusia, melalui inovasi keuangan mereka, telah membentuk cara kita berinteraksi dengan nilai dan keuangan. Dengan mengeksplorasi akar perkembangan awal ini, kita dapat lebih memahami fondasi sistem keuangan yang ada saat ini dan melihat seberapa jauh perjalanan yang telah kita tempuh. Melanjutkan dari sini, mari kita eksplorasi bagaimana praktek perbankan semakin berkembang, memberikan fondasi bagi lembaga keuangan yang lebih kompleks. Seiring meningkatnya kompleksitas perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, perbankan mulai memainkan peran yang lebih aktif dalam mendorong investasi dan memberikan pinjaman.

Munculnya dokumen-dokumen keuangan, seperti surat berharga dan cek, memberikan fleksibilitas dalam transaksi bisnis. Pada titik ini, perbankan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan dan penyaluran dana, tetapi juga berperan sebagai katalisator dalam pertumbuhan ekonomi. Inovasi seperti sistem perbankan nasional dan internasional mengubah dinamika keuangan global, membuka pintu untuk integrasi pasar keuangan di seluruh dunia.

Evolusi teknologi juga berkontribusi pada perubahan dalam praktek perbankan. Mesin uang otomatis (ATM), transaksi online, dan pembayaran digital menjadi bagian integral dari layanan

perbankan modern, memfasilitasi akses dan kecepatan dalam bertransaksi. Dengan demikian, melalui pemahaman lebih lanjut tentang perkembangan perbankan dari masa lalu hingga sekarang, kita dapat merasakan bagaimana lembaga keuangan telah mengubah dan terus mengubah cara kita berinteraksi dengan nilai dan keuangan dalam masyarakat global yang terus. Selanjutnya, sub bab ini akan menyoroti dampak revolusi industri terhadap perkembangan perbankan. Pada abad ke-19, revolusi industri menciptakan lompatan besar dalam produksi dan perdagangan. Perbankan merespons dengan menyediakan layanan keuangan yang lebih canggih untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Era ini menyaksikan pembentukan bank sentral dan sistem mata uang nasional, yang menjadi pilar dalam pengaturan kebijakan moneter. Bank-bank sentral memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas mata uang dan mengelola pasokan uang. Selain itu, inovasi dalam instrumen keuangan seperti obligasi dan saham semakin memperluas peran perbankan dalam mendukung investasi dan modal usaha. Inilah awal munculnya pasar modal yang semakin terintegrasi.

Pada abad ke-20, perkembangan teknologi informasi meluaskan jangkauan layanan perbankan dengan pengenalan kartu kredit, perbankan elektronik, dan transfer dana internasional yang lebih efisien. Semua ini membentuk fondasi untuk era perbankan digital yang kita kenal saat ini. Dengan pemahaman tentang perjalanan panjang ini, kita dapat mengapresiasi bagaimana perbankan telah beradaptasi dan berkembang sejalan dengan

evolusi ekonomi dan teknologi. Sub Bab ini mengajak kita untuk merenung tentang peran perbankan dalam membentuk masyarakat modern dan memandang masa depan potensalnya di era digital yang terus berubah.

Sub Bab A telah membawa kita melalui perjalanan yang menarik, dari sistem barter hingga era perbankan digital. Lanjutkan dari sini, mari kita fokus pada dampak globalisasi terhadap perkembangan perbankan. Dalam era globalisasi, perbankan tidak lagi terbatas oleh batas-batas nasional. Pasar keuangan internasional semakin terhubung, memungkinkan aliran modal dan investasi secara lebih bebas di seluruh dunia. Bank-bank multinasional berkembang, menyediakan layanan keuangan lintas batas bagi perusahaan dan individu. Pada saat yang sama, globalisasi membawa risiko dan tantangan baru. Krisis keuangan global, seperti yang terjadi pada 2008, menyoroti keterkaitan yang kuat antara lembaga keuangan di berbagai negara. Hal ini mendorong perbankan untuk lebih memperhatikan manajemen risiko dan regulasi keuangan internasional.

Perkembangan terbaru mencakup peran perbankan dalam mendorong inklusi keuangan. Melalui teknologi, perbankan menciptakan solusi untuk memastikan akses ke layanan keuangan di berbagai lapisan masyarakat, bahkan di daerah terpencil. Sebagai penutup, pemahaman tentang perjalanan sejarah perbankan membawa kita ke realitas saat ini yang kompleks dan terkoneksi secara global. Sub Bab ini menantang kita untuk memikirkan peran perbankan di tengah dinamika global yang terus berkembang, serta bagaimana

lembaga keuangan akan berperan dalam membentuk masa depan keuangan dunia.

Langkah selanjutnya dalam eksplorasi perjalanan perbankan adalah fokus pada dampak teknologi terbaru, seperti kecerdasan buatan (AI) dan teknologi rantai blok (blockchain). Dalam era perbankan digital, kecerdasan buatan telah menjadi kekuatan pendorong inovasi. Algoritma AI digunakan untuk analisis risiko, personalisasi layanan keuangan, dan mendeteksi kegiatan keuangan yang mencurigakan. Hal ini membantu perbankan untuk memberikan pengalaman yang lebih adaptif dan aman bagi nasabah. Di sisi lain, teknologi *blockchain* membawa konsep desentralisasi ke dunia keuangan. Dengan basis data terdistribusi, transparansi dan keamanan transaksi meningkat. Beberapa bank mulai menjelajahi penggunaan blockchain untuk mentransformasi proses internal, seperti pelacakan transaksi dan manajemen rantai pasokan.

Selain itu, tantangan baru muncul seiring dengan perkembangan teknologi ini, termasuk kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data. Perbankan dihadapkan pada tugas membangun sistem keamanan yang kuat untuk melindungi informasi keuangan pelanggan. Dengan demikian, eksplorasi lebih lanjut dalam sub bab ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana teknologi terbaru terus membentuk perbankan modern. Ini juga mengundang kita untuk memikirkan dampak jangka panjangnya terhadap keamanan, privasi, dan evolusi lebih lanjut dari lembaga keuangan.

B. Peran Perbankan dalam Sejarah Ekonomi

Sub Bab ini memperinci peran sentral perbankan dalam merajut sejarah ekonomi, menyoroti kontribusinya yang tak terbantahkan dalam mempercepat pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

1. Peran Pertama: Fasilitator Pertumbuhan Perbankan, sepanjang sejarah, telah menjadi katalis pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan modal dan kredit untuk perusahaan dan individu. Pendanaan dari bank mendukung investasi dalam produksi, infrastruktur, dan inovasi, menciptakan lingkungan yang mendukung ekspansi ekonomi.
2. Peran Kedua: Stabilisator Keuangan Sebagai institusi keuangan yang kunci, perbankan berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Pengelolaan risiko, kebijakan moneter, dan intervensi dalam situasi krisis adalah bagian integral dari kontribusi perbankan dalam menjaga keberlanjutan ekonomi.
3. Peran Ketiga: Pemfasilitas Perdagangan Sejarah perbankan mencatat peran mereka dalam memfasilitasi perdagangan. Dengan menyediakan layanan seperti letter of credit dan bank garansi, perbankan memungkinkan perusahaan untuk bertransaksi dengan aman di pasar internasional, mendorong pertumbuhan perdagangan global.
4. Peran Keempat: Pemimpin Inklusi Keuangan Perbankan juga memiliki peran signifikan dalam memperluas akses ke layanan keuangan. Inisiatif inklusi keuangan, seperti

- pemberian pinjaman mikro, menunjukkan komitmen perbankan untuk membantu kelompok masyarakat yang lebih luas mencapai stabilitas keuangan.
5. Peran Kelima: Pengelola Likuiditas dan Pembayaran Seiring perkembangan, perbankan memainkan peran penting dalam manajemen likuiditas dan sistem pembayaran. Dengan menyediakan rekening giro, transfer elektronik, dan layanan pembayaran, perbankan memfasilitasi transaksi harian dan memastikan kelancaran aktivitas ekonomi.
 6. Peran Keenam: Pendorong Inovasi dan Pembangunan Perbankan juga telah menjadi motor utama inovasi ekonomi. Bank mendukung riset dan pengembangan, memberikan pinjaman untuk proyek inovatif, dan merangsang pertumbuhan sektor-sektor baru. Inisiatif seperti pembiayaan riset dan venture capital menunjukkan peran perbankan dalam membentuk ekosistem inovasi.
 7. Peran Ketujuh: Penyeimbang Siklus Ekonomi Selama siklus ekonomi, perbankan berfungsi sebagai penyeimbang penting. Selama periode kemakmuran, bank memberikan pinjaman dan memfasilitasi investasi. Sebaliknya, selama resesi, bank bisa memberikan dukungan likuiditas dan restrukturisasi untuk membantu bisnis melewati masa sulit.
 8. Peran Kedelapan: Pemimpin Tanggung Jawab Sosial Dalam era modern, perbankan semakin mengakui tanggung jawab sosialnya. Melalui program-program keberlanjutan dan investasi sosial, bank berupaya memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Hal ini

mencerminkan transisi perbankan menjadi pemain kunci dalam mendefinisikan tujuan-tujuan sosial dan lingkungan.

9. Peran Kesembilan: Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Perbankan memiliki peran penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi. Dengan memberikan akses ke layanan keuangan dan pelatihan, bank dapat membantu individu dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan kapabilitas ekonomi mereka sendiri, mengurangi kesenjangan ekonomi.
10. Peran Kesepuluh: Katalisator Keuangan Inklusif Perbankan juga memainkan peran kunci dalam mendorong inklusi keuangan. Melalui inisiatif seperti pembukaan rekening bank tanpa biaya atau minimum deposit, perbankan menciptakan akses ke layanan keuangan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan.
11. Peran Kesebelas: Pemberi Modal dan Pendana Inovasi Perbankan terus menjadi sumber pendanaan yang signifikan untuk proyek-proyek inovatif dan bisnis rintisan. Dengan memberikan pinjaman dan modal ventura, bank mendukung pertumbuhan sektor-sektor yang mendorong inovasi dan penciptaan lapangan kerja.
12. Peran Keduabelas: Transformator Teknologi Keuangan Perkembangan teknologi telah mendorong perubahan mendasar dalam peran perbankan. Penerapan teknologi finansial (*fintech*) dan perbankan digital memungkinkan akses yang lebih mudah dan efisien ke layanan keuangan, menciptakan pergeseran signifikan

dalam cara masyarakat berinteraksi dengan uang dan keuangan.

13. Peran Ketigabelas: Pengelola Resiko Sistemik
Dalam ekosistem keuangan yang kompleks, perbankan juga berfungsi sebagai pengelola risiko sistemik. Bank sentral dan lembaga pengawas keuangan bekerja sama dengan bank komersial untuk memitigasi risiko sistemik, menjaga stabilitas dan keamanan ekonomi.
14. Peran Keempatbelas: Pemimpin Transisi Keuangan Hijau
Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, perbankan semakin berperan sebagai pemimpin dalam transisi keuangan hijau. Investasi berkelanjutan, pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan, dan penekanan pada praktik bisnis yang bertanggung jawab mencerminkan peran perbankan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan.

Sub Bab ini mengajak kita untuk merenung tentang bagaimana peran perbankan terus berkembang dalam menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi global dan tantangan kontemporer. Dengan memahami peran ini, kita dapat mengantisipasi bagaimana perbankan akan terus membentuk peta ekonomi di masa depan.

C. Evolusi Lembaga Keuangan Modern

Sub Bab ini membahas perjalanan evolusi lembaga keuangan, menjelajahi transformasi dari lembaga tradisional hingga institusi keuangan modern yang beradaptasi dengan era digital.

1. Fase Awal: Lembaga Keuangan Tradisional

Evolusi dimulai dengan lembaga keuangan tradisional, seperti bank dan perusahaan asuransi, yang memberikan layanan keuangan dasar seperti penyimpanan uang dan perlindungan aset. Model ini melibatkan interaksi tatap muka dan keterlibatan langsung dengan nasabah

2. Perkembangan Menuju Perbankan Modern

Perjalanan ini melibatkan transformasi perbankan menuju model yang lebih kompleks. Dengan peningkatan teknologi dan globalisasi, bank mulai menyediakan layanan lintas batas, memperkenalkan instrumen keuangan inovatif, dan berpartisipasi dalam pasar keuangan internasional.

3. Revolusi Digital dan Perbankan Elektronik

Sub Bab ini menggarisbawahi dampak revolusi digital pada lembaga keuangan. Perbankan elektronik dan fintech mempercepat akses ke layanan keuangan, mengubah cara transaksi dilakukan, dan mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan keuangan pribadi. Peran Lembaga Non-Bank dalam Ekosistem Keuangan Evolusi ini juga mencakup perkembangan lembaga non-bank seperti perusahaan modal ventura, hedge fund, dan fintech yang memainkan peran penting dalam mendiversifikasi dan memperkaya ekosistem keuangan.

4. Transformasi menuju Keuangan Berkelanjutan

Penting untuk dicatat bahwa evolusi ini juga mencakup tren keuangan berkelanjutan, di mana lembaga keuangan modern semakin fokus pada investasi yang berdampak positif pada lingkungan dan masyarakat. Peran Pengaturan dan Keamanan Dalam menyikapi evolusi ini, regulasi keuangan dan peran lembaga pengawas menjadi semakin

signifikan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan konsumen.

5. Inovasi Teknologi Keuangan (Fintech)

Evolusi lembaga keuangan modern tidak lengkap tanpa penekanan pada inovasi fintech. Lembaga keuangan beradaptasi dengan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, analisis data besar, dan teknologi blockchain untuk meningkatkan efisiensi operasional, menyediakan pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan menciptakan produk-produk finansial yang inovatif.

6. Pembentukan Pasar Keuangan Global:

Perjalanan evolusi lembaga keuangan juga mencakup terbentuknya pasar keuangan global yang sangat terintegrasi. Lembaga keuangan modern tidak hanya beroperasi dalam batas nasional, tetapi juga terlibat dalam perdagangan dan investasi lintas batas, menciptakan jaringan keuangan yang kompleks.

7. Bank Sentral dan Kebijakan Moneter:

Dalam konteks evolusi lembaga keuangan modern, peran bank sentral menjadi semakin penting. Mereka bertanggung jawab atas kebijakan moneter, mengatur suku bunga, dan menjaga stabilitas mata uang. Keputusan bank sentral memiliki dampak langsung pada kondisi ekonomi global.

8. Peran Lembaga Keuangan dalam Krisis Ekonomi:

Sub Bab ini juga menyoroti peran lembaga keuangan selama krisis ekonomi, seperti krisis keuangan global 2008. Pembelajaran dari krisis ini telah mendorong perubahan dalam regulasi keuangan, peningkatan keamanan sistem

keuangan, dan penekanan pada tanggung jawab sosial lembaga keuangan.

9. Tantangan dan Peluang Masa Depan:

Akhirnya, Sub Bab ini membahas tantangan dan peluang yang dihadapi lembaga keuangan modern di masa depan. Dari perubahan iklim hingga perubahan teknologi, lembaga keuangan akan terus diuji untuk beradaptasi dan menghadapi dinamika yang berkembang dalam lingkungan global.

10. Peran Lebih Mendalam dalam Inklusi Keuangan:

Evolusi lembaga keuangan modern juga terfokus pada upaya meningkatkan inklusi keuangan. Inovasi seperti layanan perbankan berbasis ponsel, yang memungkinkan akses ke layanan keuangan tanpa kehadiran fisik di lokasi tertentu, menjadi kunci dalam membawa layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan.

11. Pengelolaan Risiko dan Kepatuhan:

Di tengah kompleksitas perubahan dan inovasi, pengelolaan risiko dan kepatuhan semakin menjadi fokus utama lembaga keuangan modern. Regulasi yang ketat dan kepatuhan terhadap standar etika bisnis menjadi kunci untuk menjaga kestabilan dan kepercayaan dalam sistem keuangan global.

12. Masa Depan Mata Uang Digital

Perkembangan terkini mencakup eksplorasi mata uang digital yang didukung oleh teknologi blockchain dan konsep-konsep terkait. Mata uang digital sentral dan inisiatif kripto mungkin membawa perubahan signifikan dalam dinamika keuangan global dan peran lembaga keuangan.

13. Pentingnya Literasi Keuangan: Evolusi

Lembaga keuangan modern juga menggarisbawahi kebutuhan akan literasi keuangan yang lebih baik di antara masyarakat. Peningkatan pemahaman tentang konsep keuangan, investasi, dan manajemen risiko menjadi krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

14. Peran Pemikiran Inklusif dan Berkelanjutan

Terakhir, perjalanan lembaga keuangan modern memperlihatkan perlunya pemikiran inklusif dan berkelanjutan. Dalam merespons tuntutan global dan kebutuhan masyarakat, lembaga keuangan diharapkan untuk memainkan peran utama dalam mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan terus mengikuti perkembangan ini, Sub Bab ini mengajak kita untuk merenung tentang arah masa depan lembaga keuangan, tantangan yang dihadapi, dan peran yang dapat mereka mainkan dalam membentuk ekonomi global yang semakin terhubung.

15. Menghadapi Tantangan Teknologi

Dalam menghadapi masa depan, lembaga keuangan dihadapkan pada tantangan teknologi yang terus berkembang. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, analitika data, dan komputasi kuantum dapat mengubah paradigma layanan keuangan. Lembaga keuangan perlu tetap adaptif dan proaktif dalam mengadopsi teknologi terbaru untuk tetap relevan dan bersaing.

16. Ekosistem Keuangan Terdesentralisasi

Evolusi ini juga mencerminkan tren menuju ekosistem keuangan yang lebih terdesentralisasi, terutama dengan pertumbuhan teknologi

blockchain. Konsep decentralized finance (DeFi) dan tokenisasi aset dapat merombak cara lembaga keuangan berinteraksi dan memberikan layanan.

17. Peran Aktif dalam Keberlanjutan:

Lembaga keuangan modern semakin disorot dalam peran mereka untuk mendukung tujuan keberlanjutan. Inisiatif investasi berkelanjutan, pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan, dan transparansi terkait dampak sosial semakin menjadi fokus bagi lembaga keuangan yang progresif.

18. Pemberdayaan melalui Teknologi Keuangan Inklusif:

Keberlanjutan juga mencakup upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan global. Lembaga keuangan dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan solusi teknologi keuangan yang inklusif, memastikan akses ke layanan keuangan untuk masyarakat yang lebih luas.

19. Meningkatkan Kepatuhan dan Perlindungan Konsumen:

Dalam menjalani perubahan ini, penting bagi lembaga keuangan untuk meningkatkan sistem kepatuhan dan perlindungan konsumen. Regulasi yang lebih baik, transparansi, dan etika bisnis yang tinggi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan pelanggan.

BAB II

Fungsi dan Peran Utama Bank dan Lembaga Keuangan

A. Intermediasi Keuangan

Intermediasi keuangan adalah entitas yang perantara antara penyedia dan pengguna modal finansial (Xaverius, 2019), selain itu menurut (OJK), (2019) intermediasi keuangan adalah proses/kegiatan pengalihan dana dari penabung (ultimate lenders) kepada peminjam (ultimate borrowers). Intermediasi keuangan merujuk pada peran lembaga keuangan dalam mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus units) dengan pihak yang membutuhkan dana (defisit units). Lembaga keuangan ini bertindak sebagai perantara antara pihak-pihak tersebut, memfasilitasi aliran dana dari yang memiliki kelebihan dana ke yang membutuhkan dana.

Berikut adalah beberapa poin penjelasan dan uraian tentang intermediasi keuangan:

1. Pertemuan Antara Pihak-Pihak: Intermediasi keuangan memungkinkan pertemuan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana, seperti rumah tangga yang menabung atau investor institusional, dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana, seperti perusahaan yang ingin membiayai investasi atau individu yang ingin membeli rumah.
2. Fungsi Pengumpulan Dana: Lembaga keuangan mengumpulkan dana dari berbagai sumber,

seperti tabungan masyarakat atau dana pensiun, dan mengalokasikannya ke sektor-sektor yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan, seperti investasi dalam proyek-proyek produktif atau pembiayaan konsumen.

3. Fungsi Penyaluran Dana: Lembaga keuangan memberikan berbagai jenis layanan keuangan untuk memfasilitasi penyaluran dana, termasuk pemberian pinjaman, penerbitan saham dan obligasi, serta pengelolaan investasi. Dengan demikian, lembaga keuangan membantu mengarahkan dana dari yang memiliki kelebihan dana ke yang membutuhkan dana.
4. Diversifikasi Risiko: Salah satu manfaat utama dari intermediasi keuangan adalah kemampuannya untuk menyebar risiko. Dengan mengumpulkan dana dari banyak pihak yang berbeda dan mengalokasikannya ke berbagai proyek atau investasi, lembaga keuangan dapat mengurangi risiko yang dihadapi oleh individu atau perusahaan yang berinvestasi.
5. Efisiensi Aliran Dana: Intermediasi keuangan dapat meningkatkan efisiensi aliran dana dalam perekonomian dengan menyediakan saluran yang efisien untuk pengalokasian sumber daya ke tempat-tempat yang paling produktif dan menguntungkan.
6. Regulasi dan Pengawasan: Intermediasi keuangan sering kali diatur dan diawasi oleh pemerintah untuk memastikan kestabilan sistem keuangan dan melindungi kepentingan konsumen. Regulasi ini termasuk persyaratan modal minimum, pembatasan kegiatan spekulatif, dan standar transparansi yang ketat.

Intermediasi keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian modern dengan memfasilitasi aliran dana yang efisien, mengurangi risiko, dan memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

B. Mobilisasi Dana

Mobilisasi dana adalah suatu kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan seperti tabungan, giro, deposito dan bentuk-bentuk lain dari jumlah sekecil-kecilnya sampai jumlah yang sebesar-besarnya (Aini, 2019). Mobilisasi dana merujuk pada proses pengumpulan modal atau sumber dana dari berbagai sumber untuk digunakan dalam kegiatan atau proyek tertentu. Ini bisa terjadi di berbagai konteks, mulai dari bisnis hingga organisasi nirlaba dan bahkan di tingkat pemerintahan.

Berikut adalah penjelasan dan uraian tentang mobilisasi dana:

1. Sumber Dana: Mobilisasi dana melibatkan identifikasi sumber-sumber potensial dari mana dana dapat diperoleh. Sumber dana ini bisa berasal dari internal perusahaan atau organisasi, seperti laba yang disisihkan, atau dari eksternal, seperti pinjaman bank, investasi dari investor, atau pendanaan dari pemerintah.
2. Tujuan Pengumpulan Dana: Dana yang terkumpul biasanya dialokasikan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti ekspansi bisnis, penelitian dan pengembangan produk, investasi dalam infrastruktur, pendanaan proyek-proyek sosial atau lingkungan, dan sebagainya. Tujuan pengumpulan dana haruslah jelas dan terkait

dengan strategi jangka panjang dan kepentingan organisasi.

3. **Proses Mobilisasi:** Proses mobilisasi dana melibatkan langkah-langkah konkret untuk mengumpulkan modal. Ini bisa mencakup penyusunan proposal investasi atau pinjaman, presentasi kepada calon investor atau pemberi pinjaman, negosiasi syarat-syarat pendanaan, serta pengelolaan administrasi dan legal yang terkait.
4. **Risiko dan Pengembalian:** Calon investor atau pemberi pinjaman akan mempertimbangkan risiko yang terkait dengan investasi atau pinjaman tersebut, serta potensi pengembalian atau keuntungan yang dapat mereka peroleh. Oleh karena itu, pihak yang memobilisasi dana perlu memastikan bahwa mereka dapat memberikan jaminan yang cukup untuk mengurangi risiko dan menarik minat para pemberi dana.
5. **Manajemen Dana:** Setelah dana terkumpul, manajemen dana menjadi kunci dalam memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi pengawasan penggunaan dana, pemantauan terhadap kinerja proyek atau kegiatan yang didanai, serta pelaporan kepada para pemegang kepentingan terkait dengan penggunaan dana tersebut.
6. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses mobilisasi dan pengelolaan dana. Pihak yang terlibat dalam pengumpulan dan pengelolaan dana harus dapat memberikan

informasi yang jelas dan akurat kepada para pemegang kepentingan, serta bersedia untuk bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut.

Dalam rangka mobilisasi dana yang berhasil, penting bagi pihak yang terlibat untuk memiliki pemahaman yang baik tentang pasar keuangan, regulasi terkait, serta kemampuan untuk berkomunikasi dan bernegosiasi secara efektif dengan berbagai pihak terkait.

C. Penyaluran Kredit

Menurut Ayu & Purnawati, (2017) dalam Anggraini, (2021) penyaluran kredit menjadi bagian penting pada perbankan dikarenakan penyaluran kredit dapat menyejahterakan masyarakat, penyaluran kredit akan membuat bank mendapatkan laba, di mana laba merupakan sumber utama pendapatan bank. Menurut Putra dan Rustariyuni (2015) dalam Adha & Riwayat, (2019) kegiatan penyaluran kredit adalah rangkaian kegiatan intermediasi utama perbankan dimana penyaluran kredit merupakan tulang punggung kegiatan suatu bank. Penyaluran kredit merujuk pada proses pemberian pinjaman uang oleh lembaga keuangan seperti bank atau koperasi kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya yang membutuhkan dana. Proses ini merupakan bagian integral dari aktivitas perbankan yang melibatkan analisis risiko, penentuan suku bunga, pengaturan jangka waktu, serta penilaian terhadap kemampuan dan kebutuhan peminjam.

Berikut adalah uraian tentang beberapa tahapan dan konsep terkait dengan penyaluran kredit:

1. **Pengajuan Kredit:** Proses dimulai ketika individu atau entitas mengajukan permohonan pinjaman ke lembaga keuangan. Permohonan ini biasanya memerlukan pengisian formulir dan penyampaian dokumen pendukung seperti laporan keuangan, rencana bisnis, atau jaminan.
2. **Analisis Kredit:** Lembaga keuangan melakukan evaluasi terhadap permohonan kredit untuk menilai risiko yang terkait. Ini mencakup pemeriksaan kelayakan keuangan, evaluasi profil risiko peminjam, serta penilaian terhadap tujuan penggunaan dana.

Persetujuan Kredit: Jika permohonan kredit dinilai layak, lembaga keuangan akan memberikan persetujuan untuk penyaluran kredit. Persetujuan ini mencakup detail tentang jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu, dan ketentuan lainnya.

Pencairan Dana: Setelah persetujuan diberikan, dana pinjaman akan dicairkan kepada peminjam. Proses ini dapat dilakukan dalam bentuk transfer langsung ke rekening peminjam atau melalui cek/bilyet.

Pembayaran dan Pelunasan: Peminjam diharapkan membayar cicilan kredit sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Cicilan biasanya mencakup pembayaran pokok pinjaman dan bunga. Pelunasan kredit dilakukan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

Monitoring dan Penilaian Kinerja: Lembaga keuangan akan melakukan pemantauan terhadap pelunasan kredit serta kinerja keuangan peminjam selama masa pinjaman. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kredit dikelola dengan baik dan risiko pengembalian dipantau dengan cermat.

Penyaluran kredit merupakan salah satu fungsi utama lembaga keuangan yang memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan akses ke modal bagi individu dan bisnis. Namun, manajemen risiko yang cermat diperlukan untuk meminimalkan risiko kredit dan menjaga stabilitas keuangan lembaga serta sistem keuangan secara keseluruhan.

D. Manajemen Risiko Keuangan

Manajemen Risiko Firmansyah (2010) dalam Azizah et al., (2022) mengatakan bahwa manajemen risiko merupakan proses antisipasi terhadap risiko agar kerugian tidak terjadi kepada organisasi. Manajemen Risiko Keuangan adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memitigasi risiko-risiko yang terkait dengan aspek keuangan. Tujuannya adalah untuk melindungi nilai aset, memastikan keberlangsungan operasional, dan mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan. Menurut Kartika Sari (2018) dalam Thayib & Inaku, (2022) penerapan manajemen risiko akan memberikan manfaat yang lebih baik kepada perbankan). Berikut adalah penjelasan dan uraian tentang beberapa konsep kunci dalam manajemen risiko keuangan:

1. Identifikasi Risiko: Langkah pertama dalam manajemen risiko keuangan adalah mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan. Risiko-risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti perubahan kondisi pasar, fluktuasi nilai tukar mata uang, risiko kredit, risiko operasional, dan lain sebagainya.

2. Pengukuran Risiko: Setelah risiko-risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengukur seberapa besar dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Pengukuran risiko ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, termasuk analisis statistik, model keuangan, dan simulasi.
3. Evaluasi Risiko: Setelah risiko diukur, langkah berikutnya adalah mengevaluasi risiko-risiko tersebut untuk menentukan tingkat kedaruratan dan prioritas tindakan yang perlu diambil. Hal ini melibatkan penilaian terhadap dampak potensial terhadap keuangan perusahaan dan probabilitas terjadinya risiko tersebut.
4. Pengelolaan Risiko: Setelah risiko-risiko dievaluasi, perusahaan perlu mengembangkan strategi pengelolaan risiko untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dari risiko tersebut. Strategi pengelolaan risiko dapat mencakup transfer risiko melalui asuransi, diversifikasi portofolio, penggunaan instrumen keuangan derivatif, dan implementasi kontrol internal yang efektif.
5. Pemantauan dan Pengendalian: Manajemen risiko keuangan merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu perusahaan perlu terus memantau dan mengendalikan risiko-risiko yang ada. Ini melibatkan pemantauan kondisi pasar, evaluasi efektivitas strategi pengelolaan risiko yang telah diimplementasikan, dan penyesuaian strategi jika diperlukan.
6. Kepatuhan dan Pelaporan: Perusahaan juga perlu memastikan bahwa kegiatan manajemen risiko mereka sesuai dengan peraturan dan

kebijakan yang berlaku. Ini melibatkan pelaporan secara teratur kepada pihak yang berkepentingan, seperti regulator, pemegang saham, dan pihak internal perusahaan.

Dengan menerapkan konsep-konsep tersebut dalam praktiknya, manajemen risiko keuangan dapat membantu perusahaan untuk mengelola risiko-risiko yang terkait dengan aspek keuangan mereka dengan lebih efektif, sehingga meningkatkan keberlanjutan dan kesejahteraan perusahaan dalam jangka panjang.

E. Penyediaan Layanan Keuangan

Penyediaan Layanan Keuangan adalah proses atau aktivitas yang melibatkan berbagai entitas, seperti bank, lembaga keuangan non-bank, fintech, dan institusi lainnya, yang menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya. Layanan keuangan mencakup berbagai aspek, mulai dari penyimpanan dan perantara uang, pemberian pinjaman, investasi, hingga manajemen risiko dan asuransi.

Berikut adalah beberapa aspek penting tentang Penyediaan Layanan Keuangan:

1. Perbankan Tradisional: Bank konvensional merupakan salah satu penyedia layanan keuangan utama. Mereka menawarkan produk seperti rekening tabungan, giro, deposito, kartu kredit, dan pinjaman. Proses transformasi layanan perbankan ini sangat penting untuk dibarengi dengan terus mendengarkan pasar dan kebutuhan nasabah, karena tidak boleh dilupakan bahwa semua bank memiliki dan akan memiliki nasabah tradisional di masa depan,

yang akan mengesahkannya (Maulidya & Afifah, 2021).

2. Lembaga Keuangan Non-Bank: Selain bank, ada juga lembaga keuangan non-bank seperti koperasi kredit, perusahaan pembiayaan, dan dana pensiun yang menyediakan berbagai layanan keuangan.
3. Fintech: Perusahaan teknologi keuangan (fintech) semakin memainkan peran penting dalam penyediaan layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi untuk menyediakan solusi keuangan yang inovatif, seperti pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer (P2P), dan investasi robo-advisory. Menurut Kusuma & Asmoro, (2021) fintech juga menciptakan solusi dalam menekan biaya dan waktu penyediaan layanan keuangan yang sebelumnya harus ditanggung oleh penyedia maupun pengguna layanan. Fintech muncul dengan seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang menginginkan tuntutan hidup yang serba cepat (Rahmayati, 2022).
4. Investasi dan Manajemen Aset: Penyediaan layanan keuangan juga melibatkan perusahaan manajemen investasi, dana pensiun, dan broker saham yang membantu individu dan perusahaan dalam mengelola portofolio investasi mereka.
5. Asuransi: Perusahaan asuransi menyediakan layanan perlindungan finansial bagi individu dan perusahaan dari risiko tertentu, seperti risiko kesehatan, kerugian properti, atau kerugian bisnis.
6. Perantara Keuangan: Selain produk-produk langsung, layanan keuangan juga mencakup perantara keuangan seperti agen dan broker

yang membantu dalam transaksi keuangan dan investasi.

Penyediaan Layanan Keuangan sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, pertumbuhan bisnis, dan kesejahteraan finansial individu dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui layanan keuangan yang beragam, individu dan perusahaan dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien, mengakses modal untuk pertumbuhan dan pengembangan, serta melindungi diri dari risiko finansial yang mungkin timbul.

BAB III

Struktur Organisasi Bank dan Lembaga Keuangan

A. Struktur Organisasi

Bank dan lembaga keuangan memiliki struktur organisasi dengan tujuan membantu organisasi dalam mencapai tujuan visi misi yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Dalam organisasi bank Lembaga keuangan secara umum struktur organisasinya sama yang membedakan yaitu pada letak jenis dan sistemnya. Salah satu contoh struktur organisasi di bank syariah dan Lembaga keuangan syariah, memiliki bagian khusus yaitu badan pengawas syariah (DPS). Dapat Digambarkan sebagai berikut;

1. Sturuktur Organisasi Lembangan keuangan dan Bank Konvensional

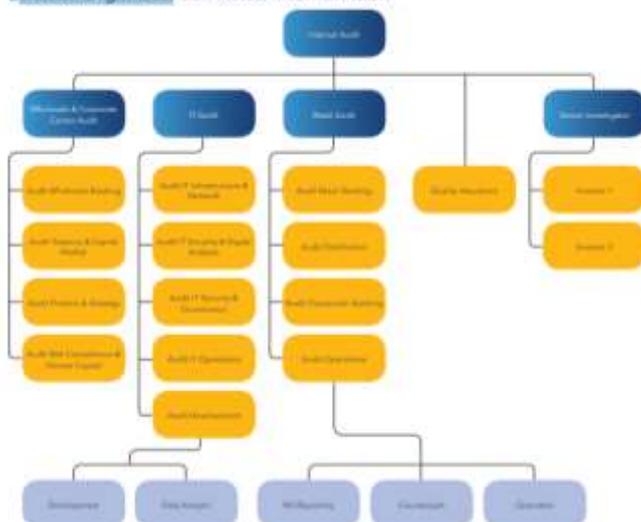
Dalam penyusunan struktur organisasi Bank konvensional dan Lembaga keuangan lainnya meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat dibawah direksi. Salah satu contoh struktur organisasi yang ada di Bank, gambar berikut strukutr organisasi Bank Mandiri, sebagai mana tertera sebagai berikut.

S TRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA HUMAN CAPITAL BANK MANDIRI



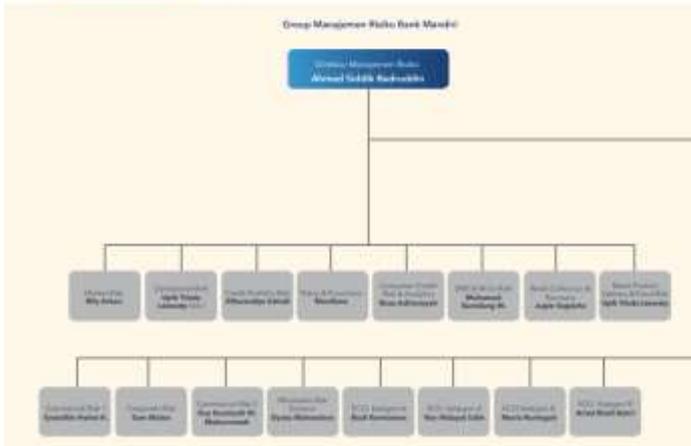
Gambar 1. Pengelola Human Capital Bank Mandiri

Struktur Organisasi dan Ketua Internal Audit

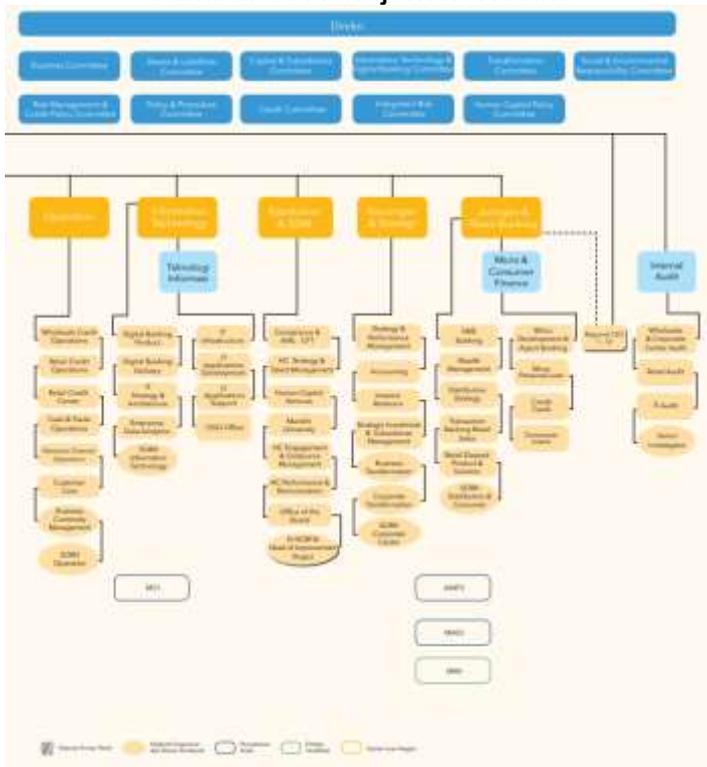


Gambar 2. Internal Audit

Struktur Organisasi Manajemen Risiko



Gambar 3. Manajemen Risiko



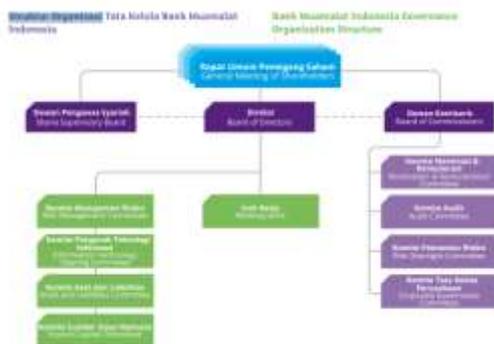
Gambar 4. Struktur Direksi

2. Sturuktur Organisasi Lembaga keuangan dan Bank Syariah

Dalam perbankan syariah stuktur organisasi perbedaan pada letak Dewan Pengawas Syariah (DPS) karena pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan BI dalam hal struktur organisasi terlatak pada Lembaga perbankan sesuai dengan unit dan Lembaga. Dalam Lembaga perbankan syariah sebagai contoh struktur organisasi dapat liat di gambar berikut ini yaitu sturuktur organisasi Bank Muamalat Indonesia sebagai beritut:



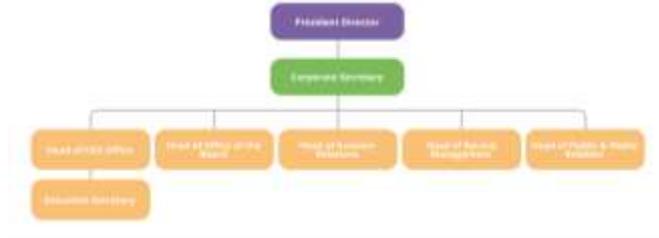
Gambar 1. Struktur Compliace, Risk dan Legal Director



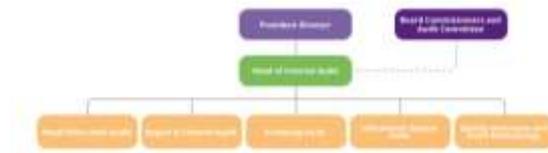
Gambar 2. Tata kelola

STRUKTUR, KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN	STRUCTURE, COMPOSITION AND BASIS OF APPOINTMENT	
<p>Struktur organisasi dan susunan keanggotaan Komunitas Belajar (Kb) per 31 Desember 2022.</p>	<p>Ref: Following is the structure (Organizational membership composition) as of December 31, 2022.</p>	
<p>Keanggotaan dan susunan keanggotaan Komunitas Belajar (Kb) per 31 Desember 2022.</p>	<p>Keanggotaan Komunitas Belajar (Kb) per 31 Desember 2022</p>	<p>Struktur Organisasi Komunitas Belajar (Kb)</p>
<p>Keanggotaan dan susunan keanggotaan Komunitas Belajar (Kb) per 31 Desember 2022.</p>	<p>Keanggotaan Komunitas Belajar (Kb) per 31 Desember 2022.</p>	<p>Struktur Organisasi Komunitas Belajar (Kb) per 31 Desember 2022.</p>
<p>Keanggotaan dan susunan keanggotaan Komunitas Belajar (Kb) per 31 Desember 2022.</p>	<p>Keanggotaan Komunitas Belajar (Kb) per 31 Desember 2022.</p>	<p>Struktur Organisasi Komunitas Belajar (Kb) per 31 Desember 2022.</p>
<p>Keanggotaan dan susunan keanggotaan Komunitas Belajar (Kb) per 31 Desember 2022.</p>	<p>Keanggotaan Komunitas Belajar (Kb) per 31 Desember 2022.</p>	<p>Struktur Organisasi Komunitas Belajar (Kb) per 31 Desember 2022.</p>

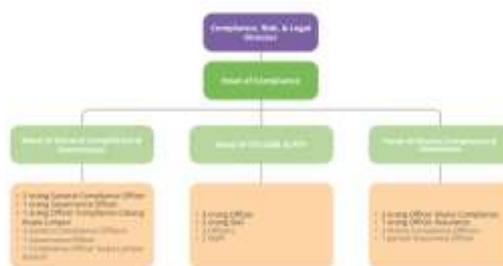
Gambar 3. Komposisi dan dasar pengangkatan



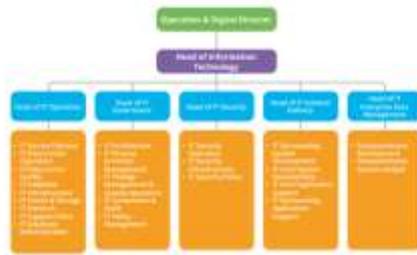
Gambar 4 Tata Kelola



Gambar 5. Tata Kelola



Gambar 7. Compliance, Risk dan Legal



Gambar 8 Operation dan Digital Director



Gambar 9. General Meeting and Shareholders

B. Pengawasan Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah mengatur, mengawasi dan melindungi untuk industri keuangan yang sehat, (Sumber: <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/tentang-perbankan/Pages/Struktur-Organisasi.aspx>).

Adapun struktur organisasi OJK dalam hal pengawasan sebagai berikut;

STRUKTUR PENGAWAS PERBANKAN



Gambar 1. Struktur Pengawas Perbankan OJK

C. Fungsi Departemen

OJK dan Bank Indonesia (BI) dalam mendukung manajemen dan pengawasan perbankan ada beberapa department diantantaranya:

Untuk BI department pendukung organisasi yaitu;

1. Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola.
2. Departemen Hukum.
3. Departemen Sumber Daya Manusia.
4. Departemen Pengembangan dan Inovasi Digital
5. Departemen Inovasi dan Digitalisasi Data
6. Departemen Layanan Digital dan Keamanan Siber
7. Departemen Keuangan.
8. Departemen Audit Intern.

Untuk OJK ada beberapa department yaitu DSKT (Departemen *Surveillance* dan Kebijakan SJK Terintegrasi), DPZT (Departemen Koordinasi Pengawasan dan Perizinan, DPDS (Departemen Pengelolaan Data dan Statistik), DKHD (Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT, dan

Daerah, DINP (Departemen Internasional dan APU-PPT), DMND (Departemen Manajemen dan Pengembangan OJK Daerah), DKSI (Deputi Komisioner Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi)

DOSB (Departemen Organisasi, SDM, dan Budaya), OJKI (OJK *Institute*), DPSI (Departemen Pengelolaan Sistem Informasi), DPAP (Departemen Pengembangan Aplikasi), DKHP (Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan), DHUK (Departemen Hukum), DPJK (Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan), DKPL (Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik), DSHK (Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Kelembagaan), DLOG (Departemen Logistik), DPSU (Departemen Perencanaan Strategis dan Keuangan), DKAI (Deputi Komisioner Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas), DPAI (Departemen Audit Internal).

DRPK (Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas), DPIK (Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus), DPNP (Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan), DIMB (Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan), DPKP (Departemen Pengendalian Kualitas dan Pengembangan Pengawasan Perbankan, DKPK (Deputi Komisioner Pengawas Konglomerasi Keuangan), DPKG (Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan)

DRPD (Departemen Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan Perbankan Daerah), DKBY (Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah), DPBP (Departemen Pengawasan

Bank Pemerintah), DPBS (Departemen Perbankan Syariah), DKBW (Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta), DPW1 (Departemen Pengawasan Bank Swasta 1), DPW2 (Departemen Pengawasan Bank Swasta 2), DPPM (Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal), DIPM (Departemen Perizinan Pasar Modal), DKVL (Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek)

DPVR (Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional), DPLE (Departemen Pengawasan Lembaga Efek), DKEP (Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus), DPEP (Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik), DRKT (Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, dan Transaksi Efek), DPPD (Departemen Pengaturan dan Pengembangan PPDP), DIPD (Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus, dan Pengendalian Kualitas PPDP).

DKPD (Deputi Komisioner Pengawas PPDP), DAJP (Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang), DPDK (Departemen Pengawasan Penjaminan, Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus), DPPL (Departemen Pengaturan dan Pengembangan PVML), DZPL (Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus, dan Pengendalian Kualitas PVML), DKPL (Deputi Komisioner Pengawas PVML), DPVL (Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan, PMV, dan LKK), DPLI (Departemen Pengawasan LKM dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya), DPIA (Departemen Pengaturan dan Perizinan IAKD), DKID (Deputi Komisioner Pengawas IAKD), DPID (Departemen

Pengawasan IAKD), DLIK (Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi), DKPP (Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen), DPUK (Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan), DPLK (Departemen Pelindungan Konsumen).

BAB IV

Regulasi dan Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan

A. Peran pemerintah dalam regulasi keuangan

Regulasi keuangan merupakan suatu kerangka kerja yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas keuangan dalam suatu negara. Peran pemerintah dalam regulasi keuangan sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi kepentingan masyarakat, dan mencegah krisis keuangan. Pentingnya regulasi keuangan tidak dapat dipandang sebelah mata dalam konteks perekonomian suatu negara. Pemerintah memainkan peran kunci dalam membentuk dan menjalankan kebijakan keuangan yang dapat mengatur, mengawasi, dan melindungi sistem keuangan dari potensi risiko dan ketidakstabilan. Melalui lembaga-lembaga seperti bank sentral, otoritas pengatur keuangan, dan badan regulasi, pemerintah berusaha menciptakan lingkungan keuangan yang sehat dan aman.

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mengatur pasar modal. Melalui otoritas pengatur keuangan dan badan-badan lainnya, pemerintah menetapkan aturan-aturan terkait dengan perdagangan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi investor, mencegah

praktek kecurangan, dan memastikan transparansi dan efisiensi dalam pasar modal. Pemerintah juga dapat menggunakan regulasi untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan pasar modal yang sehat.

Selain itu, regulasi keuangan juga mencakup pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan non-bank, seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun. Pemerintah harus memastikan bahwa lembaga-lembaga ini memiliki struktur keuangan yang kokoh dan dapat memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis atau peserta dana pensiun. Pengaturan ini sering kali melibatkan penetapan persyaratan modal, pengawasan investasi, dan evaluasi risiko untuk memitigasi potensi kerugian. Perlindungan konsumen juga merupakan aspek krusial dari regulasi keuangan. Pemerintah harus memastikan bahwa produk-produk keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat memenuhi standar keamanan dan transparansi.

Undang-undang perlindungan konsumen, termasuk regulasi terkait dengan praktik pemasaran yang adil dan jelas, membantu melindungi masyarakat dari penipuan atau praktek keuangan yang merugikan dalam menghadapi perkembangan teknologi keuangan (fintech), pemerintah juga berperan dalam menciptakan kerangka regulasi yang sesuai. Regulasi ini perlu mengakomodasi inovasi keuangan tanpa mengorbankan keamanan dan stabilitas sistem keuangan.

Pertanggungjawaban keuangan negara yang berkualitas tentunya sangat diharapkan oleh para pemangku kepentingan. Oleh karenanya, perlu

untuk menerjemahkan apa yang menjadi kriteria laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat 4 (empat) kriteria atau prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Keempat kriteria tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.

Di era sekarang, pemerintah dituntut untuk melakukan transparansi dalam hal aktivitas pengelolaan sumber daya publik, penyusunan rencana, dan pelaksanaan program pemerintah. Sebagai media akuntabilitas publik, laporan keuangan pemerintah berguna untuk mempertanggungjawabkan penggunaan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan publik kepada pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, serta hak untuk didengar aspirasinya.

Presiden Republik Indonesia, agar pengelolaan keuangan negara bukan hanya berorientasi pada prosedur tapi berorientasi pada hasil. Dan jika hal ini dapat terwujud, maka tidak

berlebihan jika laporan keuangan pemerintah sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pentingnya regulasi keuangan juga tercermin dalam upaya pemerintah untuk mencegah dan mengatasi krisis keuangan. Pada saat krisis, pemerintah dapat menggunakan instrumen kebijakan fiskal dan moneter, seperti stimulus ekonomi dan penurunan suku bunga, untuk merespons ketidakstabilan ekonomi. Di samping itu, lembaga keuangan stabil seperti bank sentral dapat memberikan dukungan likuiditas untuk menjaga kestabilan sistem keuangan, Dalam konteks regulasi keuangan global, pemerintah juga terlibat dalam upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Mereka mengeluarkan regulasi yang memerlukan lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi mencurigakan dan memastikan kepatuhan terhadap standar internasional terkait pencegahan pencucian uang. Dalam konteks regulasi keuangan, transparansi dan akuntabilitas pemerintah juga merupakan hal yang penting.

Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang regulasi keuangan serta hasil dari pengawasan dan evaluasi yang dilakukan. Hal ini membantu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan pemerintah sebagai pengawasnya dengan demikian, peran pemerintah dalam regulasi keuangan sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, lembaga keuangan non-bank, perlindungan konsumen, teknologi keuangan, pencegahan krisis, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah harus

mengambil pendekatan yang seimbang dan responsif terhadap perubahan dalam ekonomi dan pasar keuangan untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Dalam peran pemerintah dalam regulasi keuangan sangat krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi kepentingan masyarakat, dan mencegah terjadinya krisis keuangan sehingga bisa menjaga kestabilan ekonomi dalam Negara ada beberapa aspek utama dari peran pemerintah dalam regulasi keuangan, dalam mempromosikan inklusi keuangan, Pemerintah Juga harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang adil dan layak terhadap layanan keuangan. Hal ini mencakup pembentukan regulasi yang mendukung penyediaan layanan keuangan kepada masyarakat yang belum bankable, serta penyediaan pendidikan keuangan kepada masyarakat. Dan oleh sebab itu memfasilitasi dalam hal perkembangan inovasi keuangan bagaimana mencakup mendukung perkembangan teknologi keuangan (fintech) dan produk-produk keuangan baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem keuangan.

Pemerintah juga bertanggung jawab atas pengaturan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri fintech dan memastikan perlindungan konsumen yang adekuat. Dalam menjalankan semua peran ini, pemerintah juga perlu mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Keputusan-keputusan yang diambil harus seimbang antara berbagai kepentingan dan tujuan nasional, serta

harus responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan keuangan yang terjadi. Sehingga peran pemerintah dalam regulasi keuangan menjadi krusial dalam memastikan sistem keuangan yang stabil, aman, dan berkelanjutan untuk hal itu ada beberapa hal yang harus di perhatikan :

1. Pengawasan dan Pengaturan Institusi Keuangan

Pengawasan dan pengaturan institusi keuangan adalah komponen kritis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya krisis keuangan. Otoritas pengawas keuangan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa institusi-institusi keuangan beroperasi dengan transparansi, integritas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, ada beberapa aspek kunci yang perlu dipahami terkait dengan pengawasan dan pengaturan institusi keuangan. Salah satu fungsi utama pengawasan institusi keuangan adalah memastikan keamanan dan kestabilan sektor keuangan. Otoritas pengawas bertanggung jawab untuk memantau kesehatan keuangan institusi seperti bank, lembaga keuangan non-bank, dan perusahaan asuransi. Mereka melakukan evaluasi risiko, memeriksa kepatuhan terhadap peraturan, dan melibatkan diri dalam proses pengaturan untuk menjaga keseimbangan yang sehat dalam sistem keuangan, Pengaturan institusi keuangan melibatkan penetapan dan penerapan peraturan yang mengatur aktivitas dan operasi lembaga-lembaga tersebut. Peraturan ini dapat mencakup persyaratan modal minimum, tata kelola perusahaan, dan standar pelaporan keuangan. Pengaturan yang efektif bertujuan untuk

mencegah risiko berlebihan, melindungi kepentingan nasabah, dan memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi dalam batas-batas yang ditentukan untuk mencegah ketidakstabilan ekonomi.

Salah satu alat yang umum digunakan dalam pengawasan dan pengaturan institusi keuangan adalah stres tes. Stres tes adalah pengujian simulasi yang dilakukan oleh otoritas pengawas untuk menilai bagaimana suatu institusi atau sektor keuangan dapat bertahan dan berkinerja dalam skenario yang ekstrim atau tidak terduga. Hal ini membantu otoritas pengawas untuk mengidentifikasi potensi risiko dan merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi situasi krisis pentingnya pengawasan dan pengaturan institusi keuangan semakin terlihat dalam konteks global. Otoritas pengawas keuangan di berbagai negara bekerja sama untuk memitigasi risiko lintas batas dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Organisasi internasional seperti Badan Keuangan Internasional (BKI) dan Komite Pengawas Perbankan Basel (BCBS) berperan dalam mengembangkan standar internasional untuk pengawasan dan pengaturan institusi keuangan seiring dengan perkembangan teknologi, pengawasan dan pengaturan institusi keuangan juga harus beradaptasi dengan perubahan dalam model bisnis keuangan. Fintech, atau teknologi keuangan, telah mengubah lanskap keuangan dengan memperkenalkan inovasi seperti peer-to-peer lending, pembayaran digital, dan blockchain. Otoritas pengawas perlu mengembangkan kerangka kerja yang responsif dan progresif untuk

mengawasi sektor keuangan yang semakin kompleks ini tanpa menghambat inovasi.

2. Pengelolaan Kebijakan Moneter

Pengelolaan kebijakan moneter adalah aspek kunci dalam mengelola stabilitas ekonomi suatu negara. Kebijakan moneter melibatkan tindakan dan keputusan yang diambil oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang beredar, suku bunga, dan likuiditas di pasar keuangan. Tujuannya adalah untuk mencapai dan menjaga stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta penciptaan dan pemeliharaan lapangan kerja. Dalam konteks ini, ada beberapa aspek kunci yang perlu dipahami terkait dengan pengelolaan kebijakan moneter, Salah satu instrumen utama yang digunakan dalam pengelolaan kebijakan moneter adalah suku bunga. Bank sentral memiliki kendali atas suku bunga acuan, yang dapat memengaruhi biaya pinjaman bagi perusahaan dan konsumen. Dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga, bank sentral dapat mengatur tingkat aktivitas ekonomi, investasi, dan konsumsi. Misalnya, penurunan suku bunga dapat mendorong pinjaman dan investasi, sementara kenaikan suku bunga dapat membantu mengendalikan inflasi. Selain suku bunga, bank sentral juga menggunakan instrumen lain seperti operasi pasar terbuka. Ini melibatkan pembelian atau penjualan surat berharga oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar di pasar.

3. Regulasi Pasar Modal

Regulasi pasar modal adalah sistem aturan dan kebijakan yang diterapkan oleh otoritas keuangan untuk mengawasi dan mengelola kegiatan perdagangan sekuritas dan aset keuangan lainnya di pasar modal. Tujuannya adalah untuk melindungi investor, menjaga transparansi, mencegah praktik pasar yang merugikan, dan memastikan efisiensi dan integritas pasar. Dalam konteks ini, ada beberapa aspek penting yang perlu dipahami terkait dengan regulasi pasar modal dan pemerintah juga harus mengatur dan mengawasi pasar modal, termasuk bursa saham dan perdagangan instrumen keuangan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi, keadilan, dan keamanan bagi para investor.

B. Otoritas Pengawas Keuangan

Otoritas Pengawas Keuangan (OPK) merupakan lembaga yang berfungsi sebagai penjaga dan pengatur aktivitas keuangan di suatu negara. Tugasnya mencakup pengawasan terhadap lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan kestabilan dan keamanan sistem keuangan serta melindungi kepentingan konsumen.

OPK biasanya beroperasi sebagai badan independen yang memiliki kewenangan untuk membuat regulasi, memberikan izin operasi, dan menegakkan aturan terkait kegiatan keuangan. Badan ini sering kali dilengkapi dengan tenaga ahli yang memahami secara mendalam berbagai aspek keuangan dan memiliki kemampuan untuk melakukan pemantauan serta penilaian risiko yang

berkaitan Salah satu fungsi utama OPK adalah melakukan pemantauan terhadap lembaga keuangan yang beroperasi di pasar. Melalui kegiatan pemantauan ini, OPK dapat mengidentifikasi potensi risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas keuangan. Misalnya, dengan memantau kinerja bank, OPK dapat mengetahui apakah ada peningkatan risiko kredit atau likuiditas yang dapat menimbulkan masalah bagi sistem keuangan secara keseluruhan.

Selain itu, OPK juga bertanggung jawab atas pemberian izin dan lisensi kepada lembaga keuangan sebelum mereka dapat beroperasi. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap kepatuhan lembaga tersebut terhadap regulasi yang berlaku serta menilai kecukupan modal dan manajemen risiko yang dimiliki oleh lembaga tersebut.

Penegakan hukum juga merupakan fungsi penting dari OPK. Badan ini memiliki wewenang untuk memberikan sanksi dan tindakan korektif terhadap lembaga keuangan yang melanggar aturan. Sanksi ini bisa berupa denda keuangan, pencabutan izin operasi, atau tindakan lain sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Selain melakukan pengawasan dan penegakan hukum, OPK juga memiliki peran dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang keuangan dan investasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat sehingga mereka dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan melindungi diri mereka dari praktik-praktik yang merugikan.

Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, OPK juga harus bekerja sama dengan berbagai

pihak terkait seperti lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat. Kerja sama ini penting untuk memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan aturan serta untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Dalam mengatur pasar keuangan, OPK juga harus memperhatikan perkembangan teknologi dan inovasi dalam industri keuangan. Misalnya, dengan munculnya teknologi blockchain dan kecerdasan buatan, OPK perlu menyesuaikan regulasinya agar dapat mengakomodasi perkembangan tersebut tanpa mengorbankan keamanan dan stabilitas pasar.

OPK juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas sistem pembayaran dan kliring di suatu negara. Sistem pembayaran yang stabil dan efisien sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, OPK harus memastikan bahwa infrastruktur sistem pembayaran dan kliring beroperasi dengan baik dan terhindar dari risiko-risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Hal ini mencakup melakukan evaluasi terhadap dampak regulasi yang diterapkan serta mengukur efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan. Selain menjaga stabilitas sistem keuangan, OPK juga harus memperhatikan keadilan dan kepentingan konsumen. Badan ini harus memastikan bahwa layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan memenuhi standar yang sesuai dan tidak merugikan konsumen. Ini bisa melibatkan penerapan regulasi terkait transparansi, perlindungan konsumen, dan praktik bisnis yang adil dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya, OPK harus

beroperasi dengan prinsip keberagaman, integritas, dan profesionalisme. Badan ini harus memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut serta melayani kepentingan publik secara optimal dalam konteks globalisasi, OPK juga harus memperhatikan hubungan dengan otoritas pengawas keuangan di negara lain. Kerja sama antar negara dalam bidang pengawasan keuangan sangat penting untuk mengatasi tantangan dan risiko yang bersifat lintas batas seperti peredaran uang ilegal, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.

Selain itu, OPK juga harus memperhatikan perkembangan dan tren global dalam industri keuangan. Hal ini mencakup mempelajari praktik terbaik dari negara lain serta mengikuti perkembangan regulasi internasional seperti Basel III untuk mengidentifikasi risiko-risiko baru dan menyesuaikan kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya, OPK harus memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Badan ini harus siap untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan yang diambil serta menerima masukan dan kritik dari masyarakat dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, OPK dapat berperan sebagai penjaga kestabilan dan keamanan sistem keuangan serta melindungi kepentingan konsumen. Melalui pengawasan yang cermat dan pengaturan yang bijaksana, OPK dapat membantu menciptakan lingkungan keuangan yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan selain fungsi-fungsi tersebut, otoritas pengawas keuangan juga terlibat dalam merancang kebijakan dan regulasi baru yang sesuai dengan perkembangan dalam industri keuangan. Hal ini mencakup penyesuaian regulasi yang ada untuk mengakomodasi inovasi teknologi keuangan baru, serta merespons perubahan dalam kondisi pasar dan risiko-risiko baru yang muncul. Dengan melakukan ini, otoritas pengawas keuangan dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan stabilitas sistem keuangan.

Otoritas pengawasan keuangan dapat memberikan informasi terkini tentang regulasi, risiko investasi, dan praktik keuangan yang aman. Dengan meningkatkan pemahaman di kalangan pelaku pasar, diharapkan akan mengurangi peluang terjadinya pelanggaran hukum dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi risiko keuangan di era globalisasi, otoritas pengawasan keuangan juga bekerja sama dengan lembaga serupa di tingkat internasional. Hal ini penting karena aktivitas keuangan sering melibatkan transaksi lintas batas dan perusahaan multinasional.

C. Kepatuhan terhadap peraturan dan standar

Kepatuhan terhadap peraturan dan standar merupakan elemen krusial dalam menjaga integritas, transparansi, dan kesehatan suatu organisasi atau lembaga. Sebagai suatu konsep, kepatuhan mencakup ketaatan terhadap berbagai peraturan, undang-undang, dan standar yang berlaku di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat lokal hingga internasional. Kepatuhan ini

membentuk dasar untuk keberlanjutan operasional, perlindungan pemangku kepentingan, dan menjaga reputasi sebuah entitas.

Organisasi yang berkomitmen terhadap kepatuhan harus secara aktif memantau dan menyesuaikan kebijakan serta prosedur mereka agar selalu sesuai dengan perkembangan regulasi. Proses ini melibatkan identifikasi peraturan yang berlaku, pemahaman mendalam terhadap implikasinya, dan pengintegrasian kepatuhan ke dalam seluruh aspek operasional. Selain itu, terdapat kewajiban untuk menyediakan pelatihan dan pendidikan kepada anggota organisasi guna memastikan bahwa setiap individu memahami dan mematuhi norma-norma tersebut kepatuhan juga melibatkan pengelolaan risiko dengan cermat. Organisasi perlu mengidentifikasi potensi pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dapat muncul, serta mengembangkan strategi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut. Mekanisme ini mencakup implementasi kontrol internal, audit reguler, dan pelaporan yang transparan terkait dengan tingkat kepatuhan yang telah dicapai.

Standar etika dan integritas memainkan peran kunci dalam memastikan kepatuhan yang efektif. Organisasi yang memiliki budaya yang kuat terkait etika dan integritas cenderung lebih mudah mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi. Pemimpin organisasi berperan penting dalam menetapkan tone dari atas terkait dengan pentingnya kepatuhan, serta memberikan contoh yang baik dalam perilaku mereka sehari-hari dalam konteks bisnis, kepatuhan juga sering kali melibatkan hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis.

Menjaga kepatuhan dengan kontrak, perjanjian, dan regulasi yang terkait dengan hubungan bisnis adalah suatu aspek penting. Kepatuhan ini dapat membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan bisnis jangka panjang. Penting untuk diingat bahwa konsekuensi dari ketidakpatuhan dapat melibatkan sanksi hukum, denda, atau kerugian reputasi yang signifikan. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk menangani pelanggaran kepatuhan dan merespons dengan cepat terhadap setiap perubahan regulasi yang mungkin mempengaruhi operasional mereka. Penting juga untuk menyadari bahwa kepatuhan tidak hanya tentang mematuhi peraturan eksternal, tetapi juga memastikan kepatuhan internal terhadap kebijakan dan prosedur organisasi sendiri. Sistem pengelolaan kepatuhan yang efektif mencakup pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap kepatuhan internal.

Dalam dunia global yang terus berubah, organisasi perlu terus meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan peraturan dan standar. Hal ini mencakup peningkatan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi, analisis data, dan kecerdasan buatan untuk memudahkan pemantauan dan kepatuhan terhadap regulasi yang semakin kompleks dengan memahami, menghargai, dan menerapkan kepatuhan terhadap peraturan dan standar, organisasi dapat membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan berkelanjutan, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, dan mengelola risiko dengan bijaksana. Oleh karena itu, kepatuhan harus dianggap sebagai suatu investasi

strategis yang dapat meningkatkan kesehatan dan daya tahan suatu organisasi dalam menghadapi tantangan dan peluang di dunia bisnis yang dinamis.

Untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi, perusahaan dan lembaga keuangan perlu memiliki kebijakan dan prosedur internal yang ketat. Ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap regulasi yang berlaku dan penerapannya dalam setiap aspek operasional. Tim kepatuhan biasanya ditugaskan untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh organisasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, kepatuhan juga melibatkan keterlibatan secara proaktif dalam pembaruan regulasi. Organisasi perlu terus memantau perubahan lingkungan hukum dan beradaptasi dengan peraturan baru yang diberlakukan. Inovasi dan perubahan dalam model bisnis juga harus sejalan dengan kepatuhan untuk menghindari konsekuensi hukum yang merugikan peran otoritas pengawasan dan badan regulasi menjadi sangat penting dalam mendorong kepatuhan. Mereka tidak hanya menetapkan aturan, tetapi juga melakukan audit dan pengawasan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga di bawah yurisdiksinya mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Denda dan sanksi dapat diberlakukan jika ditemukan pelanggaran, memberikan insentif kuat bagi perusahaan untuk tetap berada dalam koridor kepatuhan. Kepatuhan juga mencakup aspek-aspek seperti pelaporan keuangan yang transparan dan akurat. Laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat adalah kunci untuk menghasilkan informasi yang andal bagi investor dan pemangku

kepentingan lainnya. Oleh karena itu, praktik keuangan yang sah dan akuntabel merupakan bagian integral dari kepatuhan. Selain manfaat hukum, kepatuhan juga membawa nilai tambah dalam hal reputasi perusahaan. Perusahaan yang dikenal karena mematuhi aturan dan standar etika memiliki keunggulan dalam membangun kepercayaan konsumen dan memenangkan dukungan masyarakat. Sebaliknya, pelanggaran hukum atau etika dapat merusak reputasi perusahaan secara signifikan. Perubahan dinamis dalam lingkungan bisnis dan hukum menandakan bahwa perusahaan harus menjadi fleksibel dan responsif dalam mengelola kepatuhan. Perencanaan yang matang, pelatihan karyawan, dan penggunaan teknologi untuk memantau dan melaporkan kepatuhan adalah komponen-komponen kunci dalam menciptakan budaya kepatuhan yang efektif dalam konteks global, organisasi sering kali dihadapkan pada peraturan lintas batas. Oleh karena itu, kesadaran akan kepatuhan terhadap peraturan internasional juga menjadi sangat penting. Memahami dan mematuhi peraturan global membantu perusahaan untuk menghindari konflik hukum dan membangun hubungan yang baik dengan pasar internasional.

Dengan demikian, kepatuhan terhadap peraturan dan standar bukan hanya tentang mematuhi undang-undang, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Ini adalah fondasi yang kuat bagi pertumbuhan berkelanjutan, keberlanjutan, dan reputasi positif, dan menjadi prinsip penting dalam manajemen yang efektif di berbagai sektor dan tingkatan organisasi.

A. Bank Komersil

Bank dalam sebuah negara berperan cukup penting dalam perkembangan perekonomian. Hal tersebut karena fungsi bank menjadi lembaga intermediasi bagi sektor yang terlibat dalam perekonomian. Selain itu bank yang berfungsi sebagai perusahaan tidak dapat mengesampingkan tujuan utama sebagai perusahaan. Upaya peningkatan nilai perusahaan yang dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan pemilik ataupun pemegang saham merupakan tujuan utama sebuah perusahaan (Octaviani & Komalasarai, 2017).

Peningkatan nilai yang terjadi pada perusahaan merupakan harapan dari para pemilik perusahaan, sebab hal tersebut akan memperlihatkan kesejahteraan dari para pemegang saham (Lubis & Zulam, 2017)

Bank komersil menurut para ahli antara lain :

1. Bodie, Kane, dan Marcus : Menurut Bodie, Kane, dan Marcus dalam buku "*Essentials of Investments*," bank komersial adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan dari masyarakat dan memberikan pinjaman kepada individu, bisnis, dan pemerintah. Mereka juga menyediakan berbagai layanan keuangan seperti

tabungan, cek, dan kartu kredit. (Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, 2004).

2. Rose dan Hudgins: Dalam buku mereka yang berjudul "*Bank Management and Financial Services*," Rose dan Hudgins mendefinisikan bank komersial sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara peminjam dan pemberi pinjaman, serta memberikan layanan keuangan kepada masyarakat umum. Mereka menghimpun dana melalui simpanan dan kemudian memberikan kredit kepada individu, bisnis, dan pemerintah. (Peter S. Rose and Sylvia C. Hudgins, 2005).
3. Freixas dan Rochet: Menurut Freixas dan Rochet dalam buku "*Microeconomics of Banking*," bank komersial adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menggunakan dana tersebut untuk memberikan kredit kepada peminjam. Mereka juga memberikan berbagai layanan keuangan lainnya seperti pembayaran, transfer dana, dan manajemen investasi. (Freixas, Xavier, Rochet Jean-Charles, 1997)
4. Kasmir : menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul "Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank" menjelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Aktivitas kedua dari perbankan adalah

menyelurkan dana kepada masyarakat atau yang biasa di kenal dengan istilah *lending* dan aktivitas yang ketiga adalah *service* memberikan jasa-jasa perbankan lainnya (Kasmir, 2018)

Secara umum, definisi bank komersial menurut para ahli adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat melalui simpanan dan menyalurkan dana tersebut (*lending*) melalui pemberian kredit serta menyediakan berbagai layanan keuangan (*service*) kepada individu, bisnis, dan pemerintah.

Berikut beberapa karakteristik dari bank komersil, antara lain :

1. Menyediakan Layanan Perbankan Umum: Bank komersial menawarkan berbagai layanan perbankan kepada individu, bisnis, dan organisasi. Ini termasuk tabungan, pinjaman, kartu kredit, layanan pembayaran, cek, dan transfer uang.
2. Menerima Simpanan: Bank komersial menerima deposito dari nasabah dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka. Dana dari simpanan ini kemudian digunakan untuk memberikan pinjaman kepada nasabah lain atau untuk investasi lainnya.
3. Menyediakan Pinjaman: Salah satu fungsi utama bank komersial adalah memberikan pinjaman kepada individu, perusahaan, dan institusi lainnya. Pinjaman ini bisa berupa kredit konsumen, kredit bisnis, hipotek, atau pinjaman lainnya.
4. Menawarkan Produk dan Layanan Keuangan: Bank komersial juga menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan, seperti rekening giro, deposito berjangka, kartu kredit, cek

perjalanan, layanan pembayaran tagihan, dan asuransi.

5. Beroperasi untuk Mendapatkan Keuntungan: Bank komersial adalah entitas bisnis yang beroperasi dengan tujuan mencari keuntungan. Mereka mendapatkan pendapatan dari bunga yang mereka peroleh dari pinjaman, biaya layanan, dan investasi lainnya.
6. Regulasi yang Ketat: Bank komersial tunduk pada regulasi yang ketat dari otoritas keuangan dan lembaga pengatur. Mereka harus mematuhi standar keuangan, likuiditas, dan kepatuhan yang ditetapkan oleh pemerintah dan badan pengawas.
7. Jaringan Cabang dan ATM: Bank komersial biasanya memiliki jaringan cabang yang luas dan tersebar di berbagai lokasi, serta menyediakan akses melalui ATM dan layanan perbankan online.

Bank komersial berperan penting dalam sistem keuangan untuk memfasilitasi aliran dana, membiayai investasi, dan memenuhi kebutuhan keuangan individu dan bisnis. Mereka juga memiliki peran dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh modal dan layanan keuangan

B. Bank Investasi

Bank investasi adalah lembaga keuangan yang berfokus pada menyediakan layanan keuangan untuk perusahaan, pemerintah, dan lembaga keuangan lainnya dalam hal penggalangan modal, restrukturisasi keuangan, dan manajemen investasi. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari bank investasi:

1. **Penggalangan Modal:** Bank investasi membantu perusahaan dan pemerintah dalam menggalang modal dengan menerbitkan dan menjual efek keuangan seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya kepada investor institusi dan individu.
2. **Penasehat Perusahaan:** Bank investasi memberikan nasihat kepada perusahaan dalam hal struktur modal, merger dan akuisisi, restrukturisasi keuangan, dan strategi bisnis lainnya untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memenuhi kebutuhan keuangan mereka.
3. **Manajemen Investasi:** Bank investasi juga terlibat dalam manajemen investasi, yaitu mengelola dana investasi untuk klien mereka seperti dana pensiun, dana investasi, dan investor institusi lainnya. Mereka melakukan analisis pasar, pemilihan portofolio, dan perdagangan efek untuk menghasilkan hasil investasi yang optimal.
4. **Perdagangan Efek:** Bank investasi melakukan perdagangan efek di pasar modal untuk menghasilkan keuntungan bagi klien mereka. Mereka terlibat dalam aktivitas jual beli saham, obligasi, derivatif, dan instrumen keuangan lainnya untuk memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga pasar.
5. **Penyedia Likuiditas:** Bank investasi juga berperan sebagai penyedia likuiditas di pasar, yaitu memberikan akses kepada investor dan perusahaan untuk membeli atau menjual efek keuangan dengan cepat dan efisien.
6. **Penelitian Pasar:** Bank investasi menyediakan penelitian pasar dan analisis keuangan kepada klien mereka untuk membantu dalam

pengambilan keputusan investasi. Analisis ini mencakup perkiraan harga saham, rekomendasi investasi, dan tren industri.

7. **Pengelolaan Risiko:** Bank investasi terlibat dalam manajemen risiko untuk melindungi kepentingan klien mereka dari kerugian yang tidak diinginkan. Mereka menggunakan berbagai teknik dan instrumen untuk mengelola risiko pasar, kredit, dan operasional.

Bank investasi sering kali beroperasi di pasar global dan memiliki jaringan internasional yang luas. Mereka memainkan peran penting dalam memfasilitasi akses perusahaan ke modal, menyediakan likuiditas di pasar keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan layanan keuangan yang inovatif dan efisien. Beberapa contoh bank investasi terkemuka di dunia termasuk Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan JPMorgan Chase.

C. Bank Sentral

Bank sentral adalah lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengelolaan sistem keuangan negara. Di setiap negara jenis bank ini selalu ada dan di Indonesia fungsi Bank Sentral di pegang oleh Bank Indonesia (BI). Fungsi bank sentral di atur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari bank sentral:

1. **Mengatur Kebijakan Moneter:** Salah satu fungsi utama bank sentral adalah mengatur kebijakan moneter untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti mengendalikan inflasi, menjaga

stabilitas harga, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang.

2. Menerbitkan dan Mengelola Mata Uang: Bank sentral bertanggung jawab atas penerbitan dan pengelolaan mata uang negara. Mereka mencetak uang kertas dan memproduksi koin, serta mengatur pasokan uang yang beredar di pasar.
3. Mengatur Sistem Pembayaran: Bank sentral memiliki peran penting dalam mengatur sistem pembayaran negara, termasuk kliring dan penyelesaian transaksi antarbank, serta pengelolaan sistem pembayaran elektronik.
4. Memantau dan Mengawasi Institusi Keuangan: Bank sentral memantau dan mengawasi institusi keuangan lain, seperti bank komersial dan lembaga keuangan non-bank, untuk memastikan kestabilan sistem keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi.
5. Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan: Bank sentral bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan negara, termasuk mencegah krisis keuangan dan menanggapi situasi darurat keuangan.
6. Menjalankan Kebijakan Mata Uang Asing: Bank sentral juga dapat terlibat dalam menjalankan kebijakan mata uang asing, seperti intervensi pasar untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang nasional.
7. Memberikan Kredit dan Pembiayaan Kepada Pemerintah dan Bank Komersial: Bank sentral dapat memberikan kredit dan pembiayaan kepada pemerintah serta bank komersial dalam situasi krisis keuangan atau untuk memfasilitasi kebijakan moneter.

8. Mengumpulkan Data Ekonomi: Bank sentral mengumpulkan dan menganalisis data ekonomi untuk mendukung pembuatan keputusan kebijakan, termasuk data tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan sektor keuangan.

Bank sentral biasanya merupakan lembaga independen yang diatur oleh undang-undang dan bertanggung jawab kepada pemerintah dan publik. Mereka beroperasi dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi negara dan mengelola sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di Indonesia, Bank Indonesia adalah bank sentral yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan pengaturan sistem keuangan negara.

D. Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga keuangan non-bank adalah entitas keuangan yang menyediakan berbagai layanan keuangan dan jasa keuangan yang mirip dengan bank, tetapi tidak memiliki lisensi bank dan tidak tergolong sebagai bank. Berikut adalah beberapa contoh lembaga keuangan non-bank:

1. Perusahaan Pembiayaan: Perusahaan pembiayaan, atau biasa disebut *finance company*, adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada individu dan bisnis untuk membiayai pembelian barang atau proyek. Mereka seringkali mengkhususkan diri dalam jenis pinjaman tertentu, seperti kredit mobil, kredit konsumen, atau pembiayaan modal kerja.
2. Perusahaan Asuransi: Perusahaan asuransi menyediakan layanan perlindungan finansial bagi individu dan bisnis dengan membayar

- premi. Mereka menawarkan berbagai jenis asuransi, termasuk asuransi jiwa, kesehatan, properti, kendaraan bermotor, dan asuransi bisnis lainnya.
3. **Perusahaan Sekuritas:** Perusahaan sekuritas adalah lembaga keuangan yang memberikan layanan investasi, perdagangan, dan penasihat investasi kepada klien mereka. Mereka membantu klien dalam melakukan investasi di pasar modal, seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya.
 4. **Perusahaan *Leasing*:** Perusahaan *leasing* menyediakan pembiayaan untuk pembelian atau sewa pemakaian aset seperti kendaraan, peralatan, dan mesin. Mereka membiayai pembelian aset tersebut dan kemudian menyewakannya kepada klien mereka dengan biaya sewa bulanan atau tahunan.
 5. **Perusahaan Pembiayaan Faktoring:** Perusahaan pembiayaan faktoring menyediakan dana tunai kepada bisnis dengan membeli piutang dagang atau faktur dari bisnis tersebut dengan diskon. Bisnis dapat mendapatkan akses cepat ke dana tunai dengan menjual piutang mereka kepada perusahaan pembiayaan faktoring.
 6. **Lembaga Dana Pensiun:** Lembaga dana pensiun mengelola dana pensiun bagi karyawan atau anggota untuk memberikan manfaat pensiun di masa depan. Mereka menginvestasikan dana tersebut dalam berbagai instrumen keuangan untuk menghasilkan pengembalian yang memadai bagi peserta pensiun.

7. Koperasi Keuangan: Koperasi keuangan adalah lembaga keuangan yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggota yang memiliki kepentingan bersama. Mereka menyediakan layanan keuangan seperti tabungan, pinjaman, dan investasi kepada anggota mereka.
8. *Fintech*: *Fintech* atau teknologi keuangan adalah perusahaan teknologi yang menyediakan layanan keuangan menggunakan teknologi informasi dan *platform* digital. Mereka menawarkan layanan seperti pembayaran digital, pinjaman online, investasi *peer-to-peer*, dan manajemen keuangan pribadi.

Lembaga keuangan non-bank memainkan peran penting dalam ekosistem keuangan dengan menyediakan berbagai layanan dan produk keuangan yang melengkapi peran bank tradisional. Mereka seringkali memberikan inovasi dalam industri keuangan dan membantu memperluas akses keuangan bagi individu dan bisnis. Namun, karena mereka tidak memiliki perlindungan yang sama seperti bank, regulasi dan pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank biasanya berbeda.

A. Simpanan dan Tabungan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Jenis-jenis simpanan di bank sebagai berikut:

1. Tabungan

Simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu.

2. Rekening Giro

Rekening Giro atau *currnt account* adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan ataupun badan usaha dalam rupiah ataupun mata uang asing.

3. Deposito

Deposito adalah jenis simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu.

Tabungan adalah simpanan uang dari pendapatan atau uang yang dimiliki seseorang kedalam akun atau wadah keuangan tertentu untuk digunakan di masa depan. Secara umum, pengertian tabungan adalah tindakan menyimpan sebagian dari pendapatan atau uang yang dimiliki seseorang kedalam akun khusus, seperti rekening

bank atau instrument keuangan lainnya, dengan tujuan untuk digunakan dimasa depan.

Tabungan memiliki banyak jenis serta fungsi-fungsi yang berbeda diantaranya:

1. Tabungan Konvensional

Tabungan Konvensional adalah jenis tabungan yang menggunakan dua metode pada produk simpanannya, yaitu metode bunga dan metode sistem biaya.

2. Tabungan Berjangka

Tabungan berjangka adalah salah satu jenis tabungan yang diperuntukkan bagi kebutuhan jangka tertentu

3. Tabungan Investasi

Tabungan investasi adalah jenis tabungan jangka panjang. Investasi adalah tindakan mengalokasikan sumber daya uang, dengan harapan menghasilkan pendapatan atau keuntungan di kemudian hari.

4. Tabungan Anak

Tabungan anak adalah tabungan yang dikhususkan bagi anak-anak dibawah usia 17 tahun. Tujuan tabungan ini adalah agar membiasakan anak menabung sejak dini.

5. Tabungan Haji

Tabungan Haji adalah simpanan yang digunakan untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), manfaat tabungan haji adalah untuk mempermudah umat muslim mengumpulkan biaya pembayaran ibadah haji.

6. Tabungan Giro

Tabungan Giro seringkali disebut sebagai tabungan bisnis, karena fasilitas dari tabungan ini ditunjukkan untuk kebutuhan bisnis seperti transfer

dan transaksinya dapat menggunakan cek dan bilyet.

7. Tabungan Mata Uang Asing

Tabungan mata uang asing atau disebut juga dengan valas (valas asing), mata uang yang sering digunakan dalam tabungan ini seperti dollar, euro, poundsterling dan beberapa mata uang asing lainnya.

B. Kredit dan Pinjaman

Kredit berasal dari bahas Italia, *Credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitor akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

Definisi lain tentang kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain, yang mana pihak tersebut berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan.

Setelah mengetahui apa itu kredit, selanjutnya jenis-jenis kredit yang ada. Berikut jenis-jenisnya:

1. Kredit Jangka Waktu

- a. Kredit Jangka Panjang: kredit dengan masa cicilan lebih dari 3 tahun
- b. Kredit Jangka Menengah: kredit dengan masa cicilan antara 1 sampai 3 tahun.
- c. Kredit Jangka Pendek: kredit dengan masa cicilan maksimum 1 tahun.

2. Kredit Perekonomian

- a. Kredit Pertanian: kredit yang ditujukan kepada masyarakat yang menekuni usaha perikanan, perkebunan, peternakan.

- b. Kredit Perindustrian: kredit yang ditujukan kepada para pelaku industry, mulai dari industry kecil hingga besar.
 - c. Kredit Profesi: kredit yang ditujukan bagi masyarakat yang bekerja dalam berbagai profesi, seperti guru, dokter, dan profesi lainnya.
 - d. Kredit impor-ekspor: kredit yang ditujukan kepada pedagang yang aktif melakukan ekspor-impor, berlaku untuk semua jenis produk yang diperjualbelikan
3. Kredit Macam
- a. Kredit Pembeli: kredit yang digunakan untuk mendapatkan barang, pembelian menggunakan uang muka dan barang akan langsung diterima setelahnya.
 - b. Kredit Aksep: kredit bank berupa pinjaman dengan batas plafond tertentu.
 - c. Kredit Penjual: kredit yang digunakan untuk membeli barang dengan cara mencicil. Barang bisa langsung diterima, setelah itu baru dilakukan pembayaran angsuran.
4. Kredit Ekonomi
- a. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat: kredit ini ditargetkan pada pengusaha menengah dengan kekayaan diatas Rp600 juta.
 - b. Golongan ekonomi lemah: kredit ini ditargetkan pada pengusaha dengan kekayaan maksimum Rp600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunanya).
5. Kredit dan Segi Kegunaan
- a. Kredit investasi: kredit yang digunakan untuk perluasan usaha atau proyek tertentu.

- b. Kredit Modal Kerja (KMK): kredit yang diperlukan untuk meningkatkan produksi dalam operasional suatu bisnis.

Pinjaman secara sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah barang atau jasa yang menjadi kewajiban salah satu pihak untuk dibayarkan kembali kepada pihak lain, sesuai dengan perjanjian yang dibuat baik tulisan ataupun lisan. Dalam perjanjian tersebut, wajib untuk membayar kembali dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

Pengertian pinjaman dalam lingkungan bank, pinjaman seringkali disamakan dengan kredit. Menurut Undang-undang no 10 tahun 1998, pinjaman memiliki arti penyediaan uang atau yang bisa disamakan dengan tagihan, berdasarkan kesepakatan, atau persetujuan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain, di mana pihak peminjam wajib membayarkan utangnya secara lunas selama jangka waktu yang ditetapkan dengan pemberian bunga.

Pinjaman memiliki beberapa jenis yang dibedakan dari ada tidaknya jaminan yang diberikan oleh peminjam.

1. Pinjaman dengan Agunan (Jaminan)

Pinjaman dengan jaminan adalah bentuk utang di mana peminjam menjaminkan sejumlah asset (mobil, rumah) sebagai jaminan.

Pinjaman dengan agunan terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Kredit multiguna

Merupakan salah satu fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank kepada seluruh nasabahnya dengan memberikan jaminan berupa objek

pinjaman. Jaminan tersebut dapat berupa property, kendaraan atau barang lainnya yang berupa benda berwujud. Jaminan yang diberikan oleh nasabah harus sesuai dengan pinjaman yang nasabah akan pinjamkan di bank

b. **Pegadaian**

Pinjaman uang di pegadaian hanya perlu menyerahkan jaminan yang akan ditukarkan dengan nilai pinjaman yang sesuai dengan harga jaminan tersebut. Jaminan tersebut akan dikembalikan setelah pinjamannya selesai dibayarkan.

2. **Pinjaman tanpa Agunan (Jaminan)**

Pinjaman tanpa jaminan adalah pinjaman moneter yang tidak dijamin dengan asset peminjam.

Berikut adalah jenis-jenis pinjaman tanpa agunan:

a. **Kartu kredit**

b. **Kredit Tanpa Agunan (KTA)**

c. **Pinjaman pribadi**

Tingkat suku bunga yang berlaku untuk berbagai bentuk pinjaman ini dapat bervariasi, tergantung pada pemberi pinjaman dan peminjam.

C. **Investasi dan Manajemen Kekayaan**

Investasi adalah penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu di masa yang akan datang atas uang atau dana tersebut. Definisi lainnya adalah suatu bentuk penanaman dana atau modal untuk menghasilkan kekayaan yang akan dapat

memberikan keuntungan atau tingkat pengembalian (return) baik pada masa sekarang maupun yang akan datang.

Pihak atau orang yang melakukan investasi disebut investor. Investor adalah pihak yang melakukan investasi dengan membeli asset keuangan dan mengharapkan kenaikan harganya pada saat ia akan menjual asetnya.

Ada berbagai bentuk atau jenis investasi, beberapa jenis investasi adalah:

1. Investasi Properti

Investasi ini berbentuk fisik. Secara umum, investasi property bisa sangat menguntungkan, karena harganya akan terus meningkat setiap tahun. Contoh investasi property adalah membeli tanah, dan membeli rumah yang kemudian bisa dijual atau disewakan.

2. Investasi Emas

Emas adalah bentuk investasi termudah, investasi emas bisa berupa logam mulia, perhiasan, emas batangan dan voucher emas (emas digital).

3. Investasi Reksa Dana

Investasi reksa dana diartikan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana bersama para pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio manajer investasi.

4. Investasi Deposito

Investasi deposito digunakan jika uang yang ada ingin disimpan dalam jangka waktu cukup panjang.

5. Investasi Saham

Saham adalah tanda kepemilikan dalam suatu perusahaan. Semakin tinggi risiko suatu

saham, maka semakin tinggi pula keuntungan yang akan didapatkan.

Manajemen kekayaan merupakan konsep pemanfaatan proses, layanan, dan produk manajemen keuangan untuk mengembangkan, melindungi, dan mengelola harta milik perseorangan.

Menurut Hariyono (2007), manajemen asset adalah proses terstruktur yang mencakup semua asset sebagai suatu kekayaan untuk mendukung penyediaan pelayanan. Konsep mengelola atau manajemen asset dan kewajiban secara simultan pertamakali dikembangkan oleh industri perbankan dan asuransi.

Setelah mengetahui tentang pengertian manajemen asset, maka pembahasan selanjutnya adalah tujuan manajemen asset. Ada beberapa tujuan manajemen asset dalam sebuah perusahaan, antara lain:

1. Memastikan Status Kepemilikan Suatu Asset

Manajemen asset dilakukan untuk upaya menghindari resiko penyalagunaan asset dengan pengelolaan yang benar, maka suatu asset bisa jelas kepemilikannya

2. Memilih Investasi Asset Yang Benar

Menurunkan angka kerugian menjadi tujuan sekaligus manfaat dilakukannya manajemen asset. Dengan membuat skala prioritas dan menggunakan anggaran pada asset terbaik, maka perusahaan dapat mengurangi resiko adanya kerugian dikemudian hari

3. Agar Nilai Aset tetap Tinggi, Terjaga dan Memiliki Usia hidup yang Panjang

Manajemen asset dilakukan untuk upaya membangun kesadaran para pemilik agar terus

menjaga nilai assetnya. Dalam manajemen asset, pemilik akan belajar jika naik atau turunnya nilai asset bergantung pada bagaimana perusahaan atau seseorang mengelolannya.

4. Memastikan Suatu Asset, Sehingga Dapat Menghasilkan Keuntungan yang Maksimal

Manajemen asset dilakukan untuk mengetahui status dan kondisi asset. Ketika melakukan perencanaan dan pemeliharaan, maka pemilik asset bisa mengetahui apakah asset masih memiliki nilai yang tinggi dan terus meningkat apa tidak.

5. Mencapai Penggunaan dan Pemanfaatan Asset Secara Optimal

Manajemen asset memiliki tujuan agar pemilik usaha juga bisa memanfaatkan assetnya secara optimal dan mendapatkan keuntungan maksimal dari asset yang dimilikinya

6. Agar Biaya Bisa Diminimalisasi Selama Usia Suatu Asset

Dengan manajemen asset, maka biaya perusahaan bisa diminimalisasi, sehingga keuangan perusahaan bisa berjalan dengan baik

7. Sebagai Keperluan untuk Pengamanan Asset dan Dana

Manajemen asset dilakukan perusahaan dalam upaya untuk mengalokasikan asset agar dapat digunakan secara efisien dalam jangka panjang

8. Sebagai Acuan dalam Menyusun Neraca dalam Penyusunan Laporan

Tujuan dari dilakukan manajemen asset selanjutnya adalah sebagai acuan dalam membuat neraca. Dengan mengetahui neraca yang seimbang,

maka penyusunan laporan keuangan bisa lebih maksimal.

D. Layanan Pembayaran dan Transaksi

Layanan pembayaran adalah suatu sistem dengan cakupan seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang dipakai untuk melakukan perpindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Menurut Bank Indonesia, pengertian sistem pembayaran adalah kegiatan pemindahan dana dari suatu pihak ke pihak lain dan merupakan sistem yang mencakup berbagai komponen sistem pembayaran seperti jenis alat pembayaran, kliring dan *settlement*.

Adapun fungsi dan pengertian sistem pembayaran antara lain:

1. Pendukung Stabilitas Keuangan
Pengertian sistem pembayaran yang pertama berkaitan dengan perannya sebagai elemen penting dalam mendukung stabilitas keuangan. Sebab, sistem perbankan dan keuangan sangat erat kaitannya dengan sistem pembayaran.
2. Saluran Pengendalian Ekonomi
Pengertian system pembayaran yang kedua adalah serbagai saluran atau *channel* dalam mengendalikan ekonomi, terutama melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini dapat berpengaruh terhadap likuiditas perekonomian apabila system pembayaran lancar.
3. Instrumen Pendukung Efisiensi Ekonomi
Selanjutnya, penegertian sistem pembayaran juga terkait erat dengan

posisinya sebahai instrument dalam mendukung efisiensi ekonomi. Perencanaan keuangan dalam usaha akan menjadi terganggu kalau ada ketidakstabilan dalam proses pembayaran atau transaksi, pada akhirnya, hal tersebut dapat mendorong turunnya produktivitas ekonomi suatu Negara.

Transaksi merujuk pada tindakan pengukuhan atau konfirmasi terhadap sebuah persetujuan, yang melibatkan dua atau lebih pihak. Menurut KBBI transaksi merupakan persetujuan jual beli dalam perdagangan yang dilakukan oleh dua pihak, atau kegiatan pelunasan dan pembayaran.

Berdasarkan tujuan ada tiga jenis transaksi yaitu bisnis, non-bisnis, dan pribadi, berikut pengertian masing-masing:

1. Transaksi bisnis. Segalah bentuk kegiatan sehari-hari yang membuat bisnis tetap berjalan, seperti penjualan dan pembelian, sewa bangunan, iklan dan pengeluaran lainnya.
2. Transaksi non-bisnis. Tidak melibatkan penjualan atau pembelian contohnya seperti donasi dan tanggung jawab social.
3. Transaksi pribadi. Dilakukan untuk keperluan pribadi.

Adapun dokumen yang dibutuhkan sebagai bukti dari transaksi adalah:

1. Kuitansi, dokumen yang mengakui bahwa seseorang telah menerima pembayaran
2. Cek, dokumen yang memerintahkan bank untuk membayar sejumlah uang tertentu dari rekening seseorang kepada orang sesuai dengan nama yang telah dikeluarkan

3. Bukti setoran bank, adalah slip setoran dari bank yang berfungsi sebagai alat bukti nasabah bahwa mereka sudah menyetor uangnya dalam rekening tujuan
4. Rekening Koran, ringkasan transaksi keuangan yang telah terjadi dalam periode tertentu pada rekening bank
5. Bilyet giro, surat perintah yang ditujukan kepada bank untuk memindahkan dana dari rekening pengaju ke rekening penerima

BAB VII

Peran Bank dan Lembaga Keuangan dalam Ekonomi Global

A. Pendahuluan

Bank memainkan peran penting dalam mendorong sebuah pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (Ompusunggu,2023). Semua jenis usaha baik pada sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa perumahan dan lain sebagainya, membutuhkan bank sebagai mitra untuk mengembangkan usahanya.

Bagi suatu negara peran bank dapat dianggap sebagai nadi suatu perekonomian negara (Suretno & Bustam, 2020). Oleh karena itu, peran bank sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi negara tersebut. Dapat dikatakan kemajuan bank di suatu negara dapat dianggap sebagai ukuran dalam kemajuan seluruh negara.

Peranan perbankan dalam sebuah negara dalam suatu pemerintahan dapat meningkat seiring dengan kemajuan ekonominya, yang berarti bahwa pemerintah dan masyarakat sangat lebih membutuhkan dunia perbankan.

Melihat sejarah perbankan dari dulu hingga saat ini, jelas betapa pentingnya perbankan untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan suatu perekonomian. Bank merupakan sebuah pilar kemajuan dalam masyarakat, jika tidak ada bank di sekitarnya maka kemajuan tidak akan terjadi

seperti saat ini. Negara yang tidak memiliki banyak bank yang baik dan kredibel dianggap terbelakang.

Mengingat pentingnya industri perbankan ini, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian dirubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-Undang ini menetapkan bahwa bank adalah badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan cara lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Peran bank dan lembaga keuangan telah mengalami sebuah transformasi yang signifikan selama era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi (Ismamudin et al., 2023). Peran mereka dulu terbatas pada menyediakan layanan perbankan dan keuangan konvensional seperti penyimpanan dana dan pinjaman. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi keuangan, seperti *fintech*, peran mereka menjadi berkembang hingga dapat mendorong inovasi, investasi, dan inklusi keuangan.

Dalam konteks global yang akan terus mengalami sebuah perubahan, bank dan lembaga keuangan dihadapkan dengan berbagai tantangan (Ismamudin et al., 2023). Dimana perkembangan ekonomi global yang dinamis, perubahan regulasi, serta pergeseran tren investasi dapat juga mempengaruhi peran dan strategi bank dan lembaga keuangan.

Lembaga keuangan harus memiliki kemampuan yang cukup untuk dapat menangani risiko yang ada. Pelatihan dan pengembangan profesional dalam manajemen risiko dan

kepatuhan sangat penting untuk mengantisipasi risiko yang kompleks yang mungkin muncul di masa depan (Bank for International Settlements, 2020).

Dalam industri keuangan, masalah seringkali melintasi wilayah dan negara. Sehingga untuk dapat menjaga stabilitas sistem keuangan global, kerjasama internasional perlu ditingkatkan dalam hal pengembangan regulasi, pertukaran informasi dan pencegahan risiko sistemik (World Economic Forum, 2020)

B. Hubungan Antara Bank Sentral

Bank sentral merupakan lembaga keuangan ekonomi yang sangat strategis dimana telah mengalami evolusi yang cukup panjang, baik secara historis maupun secara konseptual. Di mulai pada pertengahan abad ke-17 terjadi perkembangan dalam kelembagaan pada bank sentral yaitu dengan didirikannya bank di Swedia dan Inggris yang kemudian menjadi bank sentral di negara tersebut (Raharjo, 2021). Pada awal abad ke-20 bank sentral di seluruh dunia mulai berkembang pesat, mencapai jumlah yang tertinggi pada akhir abad ke-20 sebagai akibat dari munculnya negara yang merdeka di Afrika dan Eropa Timur (Nasution, 2023).

Kelembagaan bank sentral berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi, sosial, politik dan budaya suatu negara. Bahkan lebih menarik lagi bank sentral Eropa didirikan sebagai bank sentral gabungan negara-negara Eropa yang menggunakan mata uang tunggal yaitu Euro. Sehingga dalam kelembagaan, tujuan, tugas dan peran bank sentral juga mengalami penyesuaian

seiring dengan kemajuan ekonomi, sosial, dan politik di masing-masing negara.

Sasaran akhir dari adanya penyesuaian kelembagaan, tujuan, tugas dan peran bank sentral tersebut pada dasarnya untuk mengoptimalkan perekonomian untuk setiap negara sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umum. Bank sentral memainkan peran yang cukup signifikan dalam perekonomian. Biasanya, peran bank sentral yang paling signifikan dalam perekonomian adalah di bidang moneter, perbankan dan yang paling umum adalah bagian dari sistem pembayaran nasional atau regional (Ariani, 2023).

Salah satu alasan mengapa bank sentral sangat penting bagi perekonomian suatu negara atau wilayah karena bank sentral dianggap sebagai pusat dari berbagai lembaga atau pihak yang penting di bidang perekonomian (Ramadhani et al., 2021). Lembaga ini dikembangkan karena munculnya kebutuhan adanya lembaga public yang tidak kompetitif dan *non-profit* yang mengarah pada pembentukan lembaga ini.

Bank sentral disini diharapkan untuk dapat bertindak netral karena posisinya sebagai lembaga sentral (Fuadi, 2021), hal ini membuktikan bahwa bank sentral harus mengutamakan kepentingan umum/publik dari pada kepentingan perorang/perusahaan, konglomerat, atau pemerintah tertentu untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Sebagai lembaga utama, bank sentral harus dapat bertanggung jawab untuk mengambil kebijakan dan melakukan tindakan yang dapat mendukung kepentingan pemegang kedaulatan negara, yaitu dengan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat suatu negara atau wilayah (Sutedi, 2022).

Untuk memahami peran strategis bank sentral dalam perekonomian, kita dapat perhatikan keadaan di Amerika Serikat saat serangan teroris pada Menara kembar World Trade Center pada tanggal 11 September 2001 (Nisa, 2022). Semua orang tahu bahwa saat itu ekonomi Amerika Serikat mengalami kerusakan yang signifikan. Setelah kerusakan pada Gedung World Trade Center, indeks bursa saham langsung mengalami penurunan tajam, dan arus transaksi perdagangan global mengalami guncangan karena banyak kontrak dagang dan mitra dagang yang terbengkalai. Bahkan pemerintah Amerika Serikat sendiri tampaknya mengalami kesulitan untuk mengambil tindakan cepat yang diperlukan untuk memperbaiki perekonomian negara tersebut.

The Federal Reserve of America merupakan salah satu lembaga yang langsung berkontribusi pada pemulihan ekonomi saat itu (Jatmiko et al., 2021). Alan Greenspan yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat yang segera mengeluarkan kebijakan yang menjamin seluruh kewajiban Amerika Serikat kepada pihak luar negeri, termasuk mitra dagang di dalam negeri yang dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan bantuan bank sentral, transaksi perdagangan domestic dan internasional yang sempat terhenti mulai berjalan lagi. Pada akhirnya perekonomian dapat kembali ke tingkat normal seperti sebelumnya.

C. Peran Bank Dalam Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri adalah hubungan perniagaan antara pihak yang berada di dua negara yang berbeda, dengan dilakukannya dalam bentuk ekspor dan impor (Rinaldy et al., 2021).

Perdagangan internasional merupakan bagian penting dari sebuah perekonomian setiap negara di dunia. Melalui perdagangan internasional, perekonomian suatu negara dengan negara lain akan terhubung yang menghasilkan hubungan ekonomi yang saling mempengaruhi dan perdagangan antar bangsa dibentuk oleh lalu lintas barang dan jasa (Yumetri, 2022). Tujuan perdagangan internasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara.

Perdagangan ekspor-impor adalah istilah umum untuk sekelompok tindakan yang terlibat dalam suatu transaksi internasional (Supardi, 2021). Perdagangan ini adalah transaksi sederhana dimana pengusaha dari berbagai negara membeli dan menjual barang. Perdagangan selalu terkait dengan kehidupan masyarakat terutama dalam hal pemenuhan barang dan jasa.

Namun tidak semua barang dan jasa yang diperlukan tersedia di dalam suatu negara. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antara negara yang ditentukan oleh kedudukan geografis masing-masing negara, yang mengakibatkan perbedaan pada sumber daya alam, sumber daya manusia, tingkat harga, dan struktur ekonomi (Rinadly et al., 2021). Akibatnya barang dan jasa yang diproduksi berbeda, dan suatu negara harus membeli barang

dan jasa dari negara lain untuk dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang diproduksi sendiri.

Ekspor dan impor merupakan dua aktifitas utama dalam perdagangan internasional. Bagaimana pembayaran dilakukan dalam transaksi perdagangan karena aktivitas ekspor dan impor ini? Sebelum membahas metode pembayaran dalam perdagangan luar negeri penting bagi kita untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan luar negeri ini terjadi. Faktor-faktor berikut yang menyebabkan pembayaran luar negeri (Yumanda & Juliannisa, 2023):

1. Pembeli (importir) dan penjual (eksportir) terpisah oleh batas negara.
2. Adanya perbedaan mata uang pada masing-masing negara.
3. Komunikasi antar negara dengan teknologi mutakhir begitu cepat, namun pengangkutan barang terutama yang berbobot berat, tinggi dan berukuran besar masih menyita waktu.

Menurut kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya, pembayaran luar negeri adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan luar negeri (Raspita, 2021). Pembayaran luar negeri biasanya dilakukan melalui bank karena pembayaran tunai dianggap tidak praktis untuk lalu lintas perdagangan luar negeri. Karena itu, metode pembayaran baru muncul.

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1982 tentang Tata Cara Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa pembayaran dalam transaksi ekspor impor di Indonesia dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Pembayaran dimuka (Advance Payment)

Pembayaran di muka adalah pembayaran yang dilakukan oleh importir atau eksportir kepada penjual sebelum barang dikirim, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran di muka dapat dilakukan melalui bank Devisa atau secara langsung antara penjual dan pembeli tanpa menggunakan bank. Adapun pembayaran dapat dilakukan dengan transfer, pembayaran order, cek, wesel dan metode lainnya.

Jika pembayaran di muka dilakukan untuk seluruh nilai barang berarti penjual atau eksportir telah menerima pembayaran sebelum barang dikirimkan kepada importir. Dengan demikian, importir memberikan kredit kepada eksportir. Jika dilihat dari perspektif, hal ini paling menguntungkan eksportir dan sebaliknya bagi importir (Khasanah, 2021).

2. Perhitungan kemudian (Open Account)

Dalam perdagangan antara negara penggunaan rekening terbuka atau open account yaitu eksportir dapat mengirim barang sebelum pembayaran dilakukan oleh importir.

Dengan proses eksportir mengirim barang dan dokumen terlebih dahulu, sementara pembayaran disepakati untuk dilakukan dalam waktu yang ditentukan, biasanya sekitar 90 hari. Meskipun tidak ada aturan internasional yang mengatur penggunaan open account, praktiknya bergantung pada kesepakatan kontrak antara eksportir dan importir yang harus disusun dengan teliti untuk menghindari kesalahpahaman.

Biasanya, pembayaran melalui open account dilakukan antara mitra bisnis yang telah memiliki hubungan yang kuat dan saling terpercaya,

terutama jika mereka telah berbisnis bersama untuk waktu yang cukup lama (Syafira, 2023).

3. Wesel Inkaso (Collection Draft)

Wesel Inkaso juga dikenal sebagai *incasso wissel* atau *collection draft* adalah jenis wesel yang dikeluarkan dengan maksud memberikan wewenang kepada penerima sebagai agen untuk menagih sejumlah uang. Dalam hubungan ini penerima berperan sebagai agen, sementara penerbit wesel berperan sebagai pemegang kuasa.

Pasal 102 ayat (1) KUHD menyatakan bahwa jika penerbit wesel mencantumkan frasa seperti “jumlah untuk ditagih” atau “untuk ditagih” atau “atas pemberian kuasa” atau pernyataan serupa yang secara eksplisit menginstruksikan untuk menagih, maka pemegang pertama wesel memiliki hak penuh terkait surat wesel tersebut. Namun, ia tidak diperbolehkan untuk menyerahkan surat wesel kepada pihak lain, kecuali melalui pemberian surat kuasa (Subagja, 2020).

4. Konsinyasi (*Consignment*)

Konsinyasi dalam konteks bisnis dapat dijelaskan sebagai bentuk kolaborasi antara pemasok atau pengirim barang dengan pengecer atau penerima barang. Dalam konsinyasi, pengirim barang menyerahkan stok barang atau produk kepada penerima tanpa segera memperoleh pendapatan dari penjualan tersebut. Meskipun barang telah diserahkan, pengiriman tidak akan menerima pembayaran sampai barang atau produk tersebut terjual oleh penerima (Yuliani & Anita, 2023).

5. *Letter of Credit* (L/C)

L/C adalah suatu dokumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu

nasabahnya, yang menguasai seseorang atau sebuah perusahaan penerimaan instrument tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya bagi kepentingan, berdasarkan kondisi-kondisi atau persyaratan yang tercantum pada instrument tersebut (Al-Amaren et al., 2020)

6. Cara pembayaran lain yang lazim dalam perdagangan luar negeri sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Pada dasarnya pemerintah tidak membatasi penggunaan metode pembayaran yang lain yang diatur oleh kesepakatan bersama. Sebaliknya, pemerintah memungkinkan peningkatan frekuensi perdagangan internasional untuk meningkatkan devisa negara dan mendorong kemajuan ekonomi. Oleh karena itu, baik importir maupun eksportir yang akan melakukan transaksi perdagangan dapat memilih salah satu metode pembayaran yang ada yang dianggap sesuai dan menawarkan banyak keuntungan.

D. Krisis Keuangan Global

Selama era globalisasi, krisis keuangan lebih sering terjadi. Dimana krisis tidak hanya melanda negara-negara di Amerika Latin, Asia, dan Eropa, akan tetapi juga melanda Amerika Serikat dan menyebar ke banyak negara, termasuk Indonesia.

Krisis ekonomi global sebelumnya telah terjadi pada tahun 2008. Sebelum *booming* pada tahun 2000-an, telah terjadi beberapa fase krisis. Antara tahun 1970 dan 2008, tercatat 124 krisis sistemik perbankan, 208 krisis mata uang, 63 krisis utang negara, 42 *twin crisses* dan 10 *triple crisses*,

dan penurunan ekonomi global setiap sepuluh tahun. Selain itu juga terjadi penurunan harga minyak pada tahun 1970 dan kenaikan harga pangan dan energi pada tahun 2007-2008.

IMF (2009) menyatakan bahwa situasi krisis tersebut menyebabkan resesi yang berlangsung selama dua tahun. Setelah adanya guncangan harga minyak dunia pada tahun 1979, perekonomian global mengalami titik balik dan pergeseran. Sehingga terjadi perlambatan terhadap pertumbuhan global selama sepuluh tahun antara 1980 dan 1990, terutama di negara berkembang yang menyebabkan pertumbuhan sektor riil per kapita menurun dan bahkan berada pada titik nol antara tahun 1980, 1998 dan 2006. Situasi ini sangat jelas dan berdampak besar pada negara-negara Afrika Sub Sahara. Meskipun reformasi kebijakan *Structural Adjustment Program* (SAP) yang dilakukan oleh Bretton Woods Institution. Dari tahun 1980 hingga 1998 terdapat 956 SAP yang dinegosiasikan dan dilaksanakan sehingga periode tersebut dikenal sebagai *Lost Decades* yang muncul sebagai faktor eksternal dan dampak dari perlambatan pertumbuhan dunia industry.

Krisis keuangan tidak hanya terjadi pada negara maju, tetapi juga negara berkembang. Dalam beberapa dekade terakhir ini, negara berkembang sangat rentan terhadap gejolak perbankan, utang luar negeri, nilai tukar dan krisis inflasi. Beberapa contohnya termasuk krisis tahun 1980, krisis keuangan Asia pada akhir tahun 1990, dan krisis utang yang besar di Amerika Latin pada tahun 1990 dan 2000 yang menyebabkan resesi ekonomi global yang signifikan.

Industri jasa keuangan adalah sektor yang mempunyai pengaruh besar dalam menjaga stabilitas ekonomi. Sehingga dibutuhkan regulasi yang tepat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap regulasi memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda dari regulasi lainnya. Regulasi keuangan terdiri dari sejumlah kebijakan yang berasal dari kejadian sebelumnya yang diterapkan melalui desain regulasi yang lebih jelas.

Pemerintah Amerika Serikat membentuk berbagai badan pengawas setelah krisis keuangan global. Mereka juga memberlakukan *Glass-Steagall Act* yang memisahkan perbankan komersial dari investasi perbankan. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan regulasi untuk perbankan yang mengawasi risiko kredit. Sementara itu, undang-undang sistem keuangan di Perancis diperkuat dan lembaga keuangan dinasionalisasi

Untuk membuat regulasi perbankan yang efektif diperlukan konsep yang jelas tentang apa yang dibutuhkan, manfaat dan biaya. Regulasi dapat membantu menghentikan krisis dan mencegah sistem keuangan mengalokasikan sumber daya, karena hal itu dapat memperlambat pertumbuhan dan inovasi dan merusak efisiensi.

Menurut Allen dan Carletti (2009) ada tiga kegagalan pasar yang paling utama yaitu likuiditas yang tidak efektif, ketidaktepatan penetapan harga aset karena batas arbitrase dan efek spillover. Salah satu faktor utama kegagalan pasar adalah penyediaan likuiditas yang tidak efektif, karena biaya yang mahal sehingga diperlukan volatilitas harga yang besar tanpa adanya intervensi pemerintah. Di sisi lain, volatilitas harga dapat

menyebabkan krisis keuangan. Kedua, pasar yang efisien dan tepat dalam penentuan harga menunjukkan aset yang benar. Teori dasar efisiensi pasar adalah investor akan mendapatkan keuntungan besar dengan membeli sekuritas yang murah jika nilainya terlalu rendah. Untuk menjamin kenaikan harga pada level yang tepat, insentif memberikan mekanisme pertimbangan. Namun, dalam situasi krisis, mekanisme arbitrase menjadi tidak efektif, yang mengakibatkan penurunan harga aset, peningkatan risiko dan penurunan nilai aset (Allen dan Carletti, 2009).

BAB VIII

Pengaruh Faktor Ekonomi terhadap Bank dan Lembaga Keuangan

A. Siklus Ekonomi dan Keseimbangan Pasar

Dalam ilmu ekonomi, kegiatan ekonomi yang mengalami gelombang pasang surut tersebut dikenal sebagai siklus ekonomi (Ra'idah & Abadi, 2014). Menurut Lestari, (2011) siklus bisnis (*business cycle*) atau juga dikenal sebagai siklus ekonomi (*economic cycle*) adalah pola jangka panjang pertumbuhan (ekspansi) dan resesi (kontraksi) ekonomi. Siklus ekonomi merujuk pada fluktuasi periodik dalam aktivitas ekonomi suatu negara. Ini termasuk periode ekspansi (ketika ekonomi tumbuh), kontraksi (ketika ekonomi mengalami perlambatan), dan puncak serta lembah di antara keduanya. Siklus ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan moneter dan fiskal, inovasi teknologi, sentimen konsumen dan investor, dan perubahan dalam faktor-faktor eksternal seperti perdagangan internasional.

Pada dasarnya, siklus bisnis juga dikenal dengan siklus ekonomi yang merupakan deviasi atas trend variabel - variabel ekonomi secara keseluruhan, seperti total GDP (Long & Plosser, 1983) dalam D. Lestari, (2018). Siklus bisnis bisa menyebabkan penurunan pendapatan jangka pendek yang disebut resesi (Amarodin, 2014).

Menurut (Jacob & Waibot, 2022) berikut merupakan jbaran aktivitas ekonomi yang

digolongkan kedalam berbagai ragam indikator ekonomi Siklus Ekonomi dan Bisnis. Fluktuasi atau perkembangan dari trend selama jalannya perekonomian terbagi menjadi beberapa indikator: Moffat;2010 & Mitchell et al;2019;413 dalam (Insukindro, 2020) yaitu:

1. Indikator Ekonomi Prosiklik (*Proccyclical Economic Indicator*) adalah indikator ekonomi yang mengindikasikan gerakannya searah dengan gerakan ekonomi suatu negara atau daerah. Jadi bila perekonomian bekerjanya dengan baik, maka indikator ini biasanya menunjukkan kenaikan, dan sebaliknya jika perekonomian mengalami resesi maka indikator ini juga akan menunjukkan penurunan.
2. Indikator Ekonomi Kontersiklik (*Countercyclic Economic Indicator*) adalah indikator ekonomi yang gerakannya berlawanan arah dengan gerak perekonomian suatu negara atau daerah. Misalkan tingkat pengangguran akan meningkat jika perekonomian memburuk. Dalam kasus ini tingkat pengangguran merupakan indikator ekonomi kontersiklik.
3. Indikator Ekonomi Tidak Siklik (A Cyclic Economic Indicator) adalah indikator ekonomi yang tidak berkaitan dengan perekonomian. Misalkan, kenaikan suku bunga deposito tidak ada pengaruhnya terhadap perekonomian suku di pedalaman Papua. Dalam kasus ini suku bunga deposito adalah indikator ekonomi tidak siklik.

Siklus ekonomi dapat memiliki dampak yang signifikan pada keseimbangan pasar. Adapun menurut Salmaa & Isnaini, (2022) bahwa keseimbangan pasar adalah kesepakatan harga

yang terbentuk dalam sistem pasar antara penjual dan pembeli melalui mekanisme tawar menawar. Ketika ekonomi berada dalam fase ekspansi, permintaan untuk barang dan jasa meningkat, yang dapat menyebabkan peningkatan produksi dan investasi. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran dapat menurun karena perusahaan mempekerjakan lebih banyak pekerja untuk memenuhi permintaan yang meningkat.

Namun, selama periode kontraksi ekonomi, permintaan umumnya menurun karena konsumen dan perusahaan menjadi lebih hemat dalam pengeluaran mereka. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan produksi, investasi yang lebih rendah, dan peningkatan tingkat pengangguran karena perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menyesuaikan dengan tingkat permintaan yang lebih rendah.

Keseimbangan pasar dalam konteks siklus ekonomi terkait dengan kesetimbangan antara penawaran dan permintaan barang dan jasa. Selama periode ekspansi, permintaan dapat melebihi penawaran, menyebabkan peningkatan harga dan pertumbuhan ekonomi. Namun, selama periode kontraksi, penawaran mungkin melebihi permintaan, yang dapat menekan harga dan pertumbuhan ekonomi.

Penting untuk dicatat bahwa pemerintah dan bank sentral sering berupaya untuk mengelola siklus ekonomi dengan menggunakan kebijakan moneter dan fiskal. Misalnya, selama periode kontraksi, bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk merangsang aktivitas pinjaman dan investasi, sementara pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk merangsang

permintaan agregat. Sebaliknya, selama periode ekspansi, mereka mungkin berupaya untuk mencegah terjadinya overheating ekonomi dengan menaikkan suku bunga atau mengurangi pengeluaran. Dengan melakukan ini, mereka berharap untuk menjaga keseimbangan yang relatif stabil antara penawaran dan permintaan di pasar.

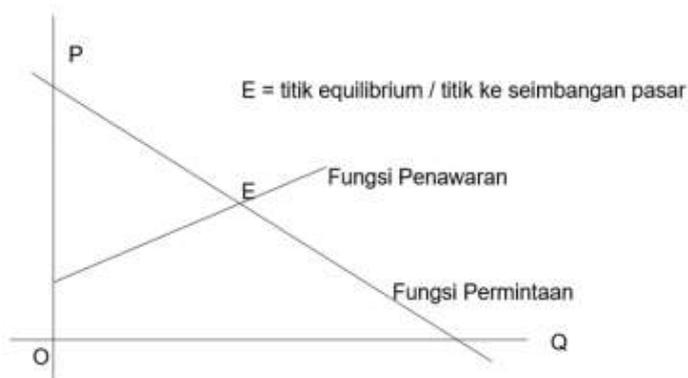
Menurut Maulidan et al., (2020) keseimbangan pasar didapat dari hukum permintaan sama dengan hukum penawaran. Dengan cara menyamakan hukum permintaan dan hukum penawaran.

Hukum permintaan = hukum penawaran

$$Q_x = Q_x$$

$$a - bPx = a + bPx$$

Sehingga, akan didapat harga keseimbangan pasar. Harga keseimbangan pasar dapat dilihat juga dari grafik yang terbentuk dari hubungan antara permintaan dan penawaran pasar sebagaimana ditunjukkan pada Gambar.



Gambar Kurva keseimbangan pasar

Agar lebih jelas, diberikan contoh kasus berikut. Diketahui hukum permintaan $Q_x = 180 -$

$3P_x$ dan hukum penawaran $Q_x = -100 + 4P_x$.

Tentukan:

- Harga keseimbangan
- Jumlah keseimbangan
- Grafik keseimbangan

Jawab :

- Harga keseimbangan

Syarat keseimbangan adalah Hukum permintaan = hukum penawaran, jadi

Hukum permintaan = hukum penawaran

$$Q_x = Q_x$$

$$180 - 3P_x = -100 + 4P_x$$

$$-7P_x = -100 - 180$$

$$P_x = \frac{-280}{-7}$$

$$P_x = 40$$

- Jumlah keseimbangan

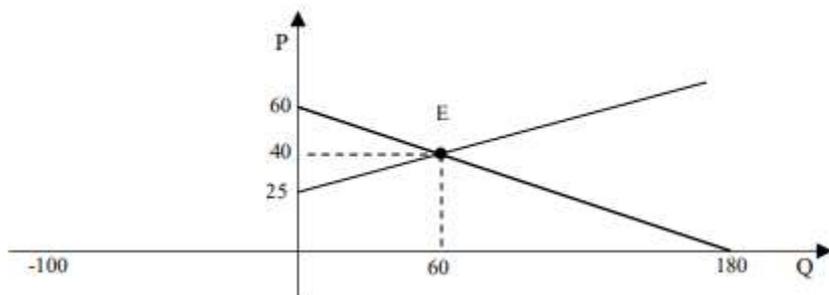
$$Q_x = 180 - 3P_x$$

$$Q_x = 180 - 3(40)$$

$$Q_x = 180 - 120$$

$$Q_x = 60$$

- grafik keseimbangan



Jadi, harga keseimbangan pasar adalah 40 satuan uang, dan jumlah keseimbangan pasar adalah 60 satuan uang.

B. Inflasi dan Suku Bunga

Inflasi dan suku bunga adalah dua konsep yang sangat terkait dalam ekonomi makro. Menurut Maronrong & Nugrhoho, (2019) bahwa faktor makroekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja saham maupun kinerja perusahaan antara lain : inflasi, tingkat suku bunga dan kurs (nilai tukar valuta asing). Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mempunyai pengaruh negatif secara tidak langsung terhadap emiten serta pasar modal (Hidayat et al., 2018). Berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya:

1. Inflasi: Inflasi adalah kenaikan umum dalam tingkat harga barang dan jasa di suatu ekonomi selama periode waktu tertentu. Inflasi dapat diukur dengan mengamati indeks harga konsumen (Consumer Price Index/CPI) atau indeks harga produsen (Producer Price Index/PPI). Tingkat inflasi yang moderat biasanya dianggap sehat untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi inflasi yang tinggi atau tidak stabil dapat menyebabkan ketidakpastian dan merugikan ekonomi. Menurut Ali et al. (2019) dalam Mourine & Septina, (2023), inflasi merupakan proses kenaikan harga barang-barang yang berjalan secara terus-menerus.
2. Suku Bunga: Suku bunga adalah biaya pinjaman uang atau pengembalian atas investasi yang dihitung sebagai persentase dari jumlah yang dipinjam atau diinvestasikan. Suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral suatu negara

(misalnya, Federal Reserve di Amerika Serikat atau Bank Sentral Eropa di wilayah euro) memengaruhi suku bunga yang ditawarkan oleh bank komersial kepada nasabah mereka. Ketika suku bunga naik, biaya pinjaman menjadi lebih mahal, yang cenderung mengurangi aktivitas pinjaman dan investasi. Sebaliknya, ketika suku bunga turun, pinjaman menjadi lebih murah, mendorong aktivitas pinjaman dan investasi. Suku bunga adalah salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan berinvestasi atau menabung (Polihu et al., 2023). Faktor-faktor yang memberi dampak pada suku bunga yaitu persyaratan pendanaan, persaingan peraturan, tujuan keuntungan yang diharapkan, tenggat waktu, jaminan kualitas, dll. (Serfiyani et al., (2013) dalam Agustin et al., (2023).

Kaitannya antara inflasi dan suku bunga adalah sebagai berikut:

- Pengaruh suku bunga terhadap inflasi: Suku bunga yang rendah cenderung merangsang pengeluaran konsumen dan investasi bisnis, yang pada gilirannya dapat menyebabkan peningkatan permintaan agregat dan potensi inflasi. Di sisi lain, suku bunga yang tinggi cenderung mendorong tabungan dan mengurangi pengeluaran, yang dapat membantu meredam tekanan inflasi.
- Pengaruh inflasi terhadap suku bunga: Bank sentral sering menggunakan kebijakan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Ketika inflasi meningkat, bank sentral mungkin akan menaikkan suku bunga untuk mendinginkan pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi. Sebaliknya, jika inflasi terlalu rendah atau ada

tanda-tanda deflasi, bank sentral mungkin akan menurunkan suku bunga untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tingkat inflasi.

Pemahaman tentang hubungan antara inflasi dan suku bunga penting bagi kebijakan moneter dan fiskal suatu negara, serta bagi investor dan konsumen dalam merencanakan keuangan mereka.

C. Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Moneter

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan bauran kebijakan makro ekonomi yang berperan untuk mencapai tujuan makroekonomi suatu negara yang telah diuraikan dalam rencana pembangunannya (Paramita, 2021). Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan dalam mengatur kegiatan ekonomi secara makro, di samping kebijakan fiskal juga terdapat kebijakan moneter yang merupakan partner kebijakan fiskal dalam mengendalikan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Pardamean, 2020). Kebijakan fiskal dan moneter adalah dua alat utama yang digunakan oleh pemerintah dan bank sentral untuk memengaruhi aktivitas ekonomi suatu negara. Berikut adalah pengaruh keduanya:

1. Kebijakan Moneter:

- Suku Bunga: Bank sentral menggunakan kebijakan suku bunga untuk mengatur jumlah uang yang beredar di pasar dan untuk mengendalikan inflasi. Suku bunga yang lebih tinggi cenderung meredam belanja konsumen dan investasi, sementara suku bunga yang lebih rendah merangsang aktivitas ekonomi.

- Uang Beredar: Melalui alat-alat seperti operasi pasar terbuka dan perubahan dalam persyaratan cadangan bank, bank sentral dapat mengontrol jumlah uang yang tersedia di pasar. Ketika bank sentral ingin merangsang pertumbuhan ekonomi, mereka dapat membeli obligasi pemerintah atau sekuritas lainnya, meningkatkan uang yang beredar di pasar.
- Nilai Tukar: Dalam beberapa negara, bank sentral dapat campur tangan di pasar valuta asing untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang nasional. Nilai tukar yang lebih rendah membuat ekspor lebih murah dan impor lebih mahal, memperbaiki neraca perdagangan suatu negara.

2. Kebijakan Fiskal:

- Pengeluaran Pemerintah: Pemerintah dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi dengan mengubah tingkat pengeluarannya. Pengeluaran yang lebih tinggi dalam bentuk infrastruktur, pendidikan, atau program kesejahteraan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi.
- Pajak: Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak untuk mengontrol pengeluaran konsumen dan investasi. Pajak yang lebih tinggi cenderung meredam belanja konsumen dan investasi, sementara pemotongan pajak merangsang aktivitas ekonomi.
- Defisit dan Utang: Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi tingkat defisit anggaran pemerintah dan utang negara. Defisit anggaran yang tinggi dapat menyebabkan

peningkatan utang nasional, sementara surplus anggaran dapat digunakan untuk membayar utang atau menahan inflasi.

Pengaruh kebijakan fiskal dan moneter dapat berinteraksi, baik secara sinergis atau bertentangan, dalam membentuk arah ekonomi suatu negara. Misalnya, jika bank sentral menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi, pemerintah mungkin merespons dengan kebijakan fiskal yang lebih lunak, seperti meningkatkan pengeluaran untuk mengimbangi efek penurunan aktivitas ekonomi yang disebabkan oleh suku bunga yang lebih tinggi. Dalam kenyataannya, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter sering diperlukan untuk mencapai tujuan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

BAB IX

Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bank dan Lembaga Keuangan

A. Prinsip-prinsip etika bisnis

Kata etika atau biasa disebut etika berasal dari kata latin etika. Ethos dalam bahasa Yunani berarti standar, nilai, aturan, standar perilaku yang baik. Etika harus dipahami sebagai cabang filsafat yang berbicara tentang nilai dan standar moral. Etika berusaha membantu manusia untuk bertindak bebas dan bertanggung jawab karena setiap tindakan selalu bersumber dari keputusan pribadi yang bebas dan selalu siap mempertanggungjawabkan tindakannya karena tindakannya mempunyai alasan yang jelas. Tujuan etika adalah membantu manusia bertindak bebas dan bertanggung jawab, karena setiap tindakan selalu merupakan hasil dari keputusan pribadi yang bebas, selalu siap mempertanggungjawabkan tindakannya, karena setiap tindakan mempunyai alasan dan pertimbangan.

Etika merupakan aturan atau prinsip yang menjadi pedoman hidup manusia, bagian dari filsafat yang berhubungan dengan standar atau moralitas secara rasional dan kritis. Jadi etika berbeda dengan moralitas (Dian Putri Agustina et al., 2020). Etika merupakan refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik atau buruk, sedangkan norma adalah institusi dan nilai

yang dikaitkan dengan baik dan buruk. Etika bisnis dapat diartikan sebagai etika yang diterapkan dalam bisnis. Etika bisnis juga dapat diartikan sebagai aturan perilaku dalam mengambil keputusan bisnis dan memenuhi harapan bisnis masyarakat. Oleh karena itu, bisnis mempunyai kewajiban moral untuk memproduksi barang dan jasa secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar mencari keuntungan (Hasoloan, 2018).

Etika bisnis dapat dipandang sebagai upaya merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip dasar etika dalam bidang hubungan ekonomi antar orang. Dapat juga dikatakan bahwa etika bisnis menekankan pada aspek moral dalam hubungan antar pelaku usaha yang berbeda. Etika bisnis merupakan cara berbisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis suatu perusahaan dapat membentuk nilai, standar dan perilaku karyawan dan manajer dalam menciptakan hubungan yang jujur dan sehat dengan pelanggan/mitra, pemegang saham dan masyarakat.

Meskipun bisnis mempunyai dampak yang signifikan terhadap pembangunan, baik ekonomi, sosial, dan budaya, namun bisnis juga mempunyai konsekuensi terhadap operasional perbankan. Perilaku yang menyinggung etika dapat terjadi di berbagai perbankan karena orang cenderung merasa bahwa dirinya benar dalam situasi yang berbeda. Oleh karena itu, dalam segala situasi, kesadaran moral diperlukan agar keputusan yang diambil tetap etis apapun kondisinya. Dunia usaha yang berkembang pesat menjadi tantangan

sekaligus ancaman bagi perbankan untuk mengungguli pesaingnya dan mempertahankan kelangsungan Lembaga perbankannya.

Untuk memenangkan persaingan dalam dunia bisnis, suatu perbankan harus mampu mempertahankan pasarnya dan menaklukkan pasar yang ada, sehingga perbankan diharapkan mempunyai kemampuan dalam merancang strategi bisnis yang ingin dilaksanakan. Peluang bisnis yang sangat baik di Indonesia telah mendorong perusahaan untuk berkembang di Indonesia. Munculnya bisnis yang berbeda-beda menunjukkan bahwa bisnis tersebut menguntungkan (Na'afi & Purwanti, 2023). Namun itu membutuhkan kerja keras. Persaingan dalam dunia bisnis sangat ketat sehingga persaingan harus dihadapi sebagai insentif untuk meningkatkan kualitas, menawarkan yang terbaik kepada konsumen. Etika bisnis mempunyai hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Etika bisnis mendorong pelanggan untuk membangun hubungan yang kuat dengan perbankan. Dalam jangka panjang, hubungan seperti ini memungkinkan perbankan memahami harapan dan kebutuhan pelanggan secara menyeluruh (Agus Triansyah et al., 2023).

Etika perbankan merupakan kesepakatan antar bankir yang merupakan suatu standar tata krama yang baik dalam kegiatan usahanya dan merupakan seperangkat prinsip atau nilai moral (values) tentang hal-hal yang baik serta tugas dan tanggung jawab para pelakunya. Untuk memahami hal-hal yang baik, baik dan mencegah keburukan.

Dalam etika bisnis, pencapaian yang dilakukan oleh perbankan atau Lembaga keuangan

harus memenuhi prinsip etika bisnis, Adapun prinsip etika bisnis antara lain:

1. Prinsip otonomi

Prinsip otonomi merupakan sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Untuk bertindak secara otonom, diandaikan ada kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan yang menurutnya terbaik itu. Kebebasan adalah unsur hakiki dari prinsip otonomi ini. Dalam etika, Kebebasan adalah prasyarat utama untuk bertindak secara etis, karena tindakan etis adalah tindakan yang bersumber dari kemauan baik serta kesadaran pribadi. Hanya karena seseorang mempunyai kebebasan, ia bisa di tuntutan untuk bertindak secara etis.

Berkat otonomi, pedagang dan karyawan tidak lagi diperlakukan sebagai pekerjaan belaka di perusahaan mana pun, melainkan digunakan sesuai kebutuhan bisnis dan kepentingan perusahaan. Dengan kata lain, dengan otonomi, pedagang menjadi subjek yang benar-benar bermoral, bertindak bebas dan bertanggung jawab atas tindakannya. Artinya, sebagai subjek moral, kita tidak lagi seenaknya saja bertindak sehingga merugikan hak dan kepentingan pihak lain.

Otonomi juga memungkinkan terjadinya inovasi, mendorong kreativitas, meningkatkan produktivitas, yang sangat berguna bagi perusahaan modern yang terus berubah dalam menghadapi persaingan yang ketat. Prinsip otonomi juga berlaku pada tanggung jawab moral semua pihak yang terlibat.

2. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran. Ada tiga bidang bisnis yang secara jelas menunjukkan bahwa suatu bisnis tidak dapat bertahan dan berkembang kecuali didasarkan pada integritas. Pertama, jujur dalam memenuhi syarat-syarat kontrak dan perjanjian. Kejujuran ini sangat penting bagi kedua belah pihak dan sangat menentukan masa depan hubungan dan kelangsungan bisnis kedua belah pihak. Sebab jika salah satu pihak berbuat curang dengan memenuhi syarat-syarat akad, maka penipu tidak mungkin lagi menjalin hubungan komersial dengan pihak yang berbuat kecurangan.

Kedua, kejujuran dalam menawarkan barang atau jasa dengan kualitas dan harga yang sebanding. Dalam pasar terbuka dimana terdapat pasokan barang dan jasa yang beragam dan melimpah di pasar, konsumen dengan mudah berpindah dari satu produk ke produk lainnya. Saking hebatnya cara, trik curang bukan lagi cara bisnis yang bagus dan sukses. Kejujuran merupakan sebuah prinsip yang sangat penting dan penting bagi sebuah bisnis yang baik dan berjangka panjang.

Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Kejujuran dalam perusahaan adalah inti dan kekuatan perusahaan itu. Perusahaan itu akan hancur kalau suana kerja penuh dengan akal-akalan dan tipu-menipu. Kalau karyawan diperlakukan secara baik dan manusiawi, diperlakukan sebagai manusia yang punya hak-hak tertentu, kalau sudah terbina sikap saling menghargai sebagai manusia antara satu dan yang lainnya, ini pada gilirannya akan terungkap keluar dalam relasi dengan perusahaan

lain atau relasi dengan konsumen. Selama kejujuran tidak terbina dalam perusahaan, relasi keluar pun sulit dijalin atas dasar kejujuran.

3. Prinsip Keadilan

Secara harfiah, kesetaraan berarti sama atau setara atau genap. Hukum pada umumnya dipahami sebagai tentang melindungi hak-hak orang lain. Pengertian hak adalah pemberian hak kepada pihak yang mempunyai hak terhadapnya. Keadilan merupakan ukuran keabsahan tatanan kehidupan bermasyarakat, bermasyarakat, dan bernegara.

Keadilan pada dasarnya berarti memperlakukan seseorang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Setiap orang berhak untuk diakui dan diperlakukan dengan nilai dan nilai yang sama, dengan hak dan tanggung jawab yang sama, tanpa membedakan ras, pangkat, asal usul, kekayaan, pendidikan atau kepercayaan.

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan sama berdasarkan aturan yang adil dan bertanggung jawab. Undang-undang mensyaratkan bahwa setiap orang yang bekerja dalam dunia usaha harus diperlakukan sesuai dengan haknya, dan hak serta kepentingan pihak manapun tidak boleh dirugikan.

4. Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit principle*). Menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Kalau prinsip keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, prinsip saling menguntungkan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar

semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain.

Prinsip ini terutama sesuai dengan sifat dan tujuan perusahaan. Karena Anda ingin untung dan saya ingin untung, malah kita berbisnis untuk saling menguntungkan. Dalam bisnis yang kompetitif, prinsip ini mensyaratkan bahwa persaingan antar perusahaan harus menciptakan situasi yang saling menguntungkan.

5. Prinsip Integritas Moral

Prinsip integritas moral merupakan prinsip tidak merugikan orang lain ketika mengambil keputusan dan tindakan bisnis. Prinsip ini didasarkan pada kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati sebagai individu.

Prinsip integritas moral. Hal ini dipahami sebagai kebutuhan internal para pengusaha atau perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan tetap menjaga reputasi baik manajer atau orang-orangnya dan perusahaan. Dengan kata lain prinsip ini merupakan tuntutan dan motivasi dari dalam diri operator dan perusahaan untuk menjadi yang terbaik dan dapat dibanggakan. Dan hal ini tercermin dari seluruh interaksinya dengan siapa pun, baik di luar maupun di dalam perusahaan.

B. Kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan

Pembahasan mengenai konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sedang menjadi tren baru di berbagai negara, termasuk Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor keuangan, harus mampu mengimplementasikan tujuan yang terkandung dalam konsep tersebut.

Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang (Hayati et al., 2020; Karyanto & Martiana, 2020). Namun terkadang pembangunan dihadapkan pada konflik kepentingan, dimana pencapaian kesejahteraan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup, baik alam maupun sosial, menjadi taruhannya. Elemen pilar utama pembangunan berkelanjutan. Terdiri dari unsur pertumbuhan ekonomi, efisiensi dan stabilitas yang menopang pilar perekonomian; unsur pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan pendukung pilar sosial; dan pilar lingkungan hidup yang didukung oleh unsur keanekaragaman, sumber daya alam, dan pencemaran.

Tidak dapat dipungkiri masih banyak yang belum memahami pentingnya perekonomian berkelanjutan dan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, perbankan dapat berperan dalam mendukung sosialisasi dan mempercepat perubahan industri untuk beralih dari praktik tradisional ke pengelolaan bisnis berkelanjutan. Salah satu cara nyata penerapan keuangan berkelanjutan adalah dengan tidak memberikan pinjaman modal kepada perusahaan yang dapat merugikan lingkungan (Dewi et al., 2023; Salim, 2020). Oleh karena itu, lembaga keuangan didorong untuk memasukkan prinsip-prinsip lingkungan hidup, sosial dan tata kelola perusahaan dalam kebijakan kredit dan investasi mereka.

Pada dasarnya, sustainability tidak hanya mengenai kegiatan sosial, donasi, dan filantropi yang berkaitan dengan lingkungan. Lebih dari itu,

sustainability juga mencakup profitabilitas perusahaan, inovasi, perubahan paradigma berpikir dan cara kerja, ketenagakerjaan, kualitas produk dan jasa, serta perlindungan pelanggan (Berliandaldo et al., 2021; Sukma & Ismail, 2023). Oleh sebab itu, prinsip keberlanjutan merupakan kunci strategi bisnis pada masa depan. Demi memuluskan strategi tersebut, seluruh pemangku kepentingan harus berkolaborasi dalam mengimplementasikan kerangka kerja yang komprehensif dari kebijakan berkelanjutan nasional. Tak terkecuali, sektor perbankan. Dengan dukungan teknologi yang mumpuni, sektor perbankan memainkan peran penting dalam menyediakan *sustainable finance*.

Dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Pertumbuhan yang tidak hanya mementingkan faktor ekonomi saja, namun juga memperhatikan faktor sosial dan lingkungan hidup.

Tujuan keuangan berkelanjutan antara lain:

- (1) Menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai.
- (2) Meningkatkan daya tahan dan daya saing Bank yang berkontribusi positif pada stabilitas sistem keuangan.
- (3) Mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi dan mencegah kerusakan lingkungan hidup, menjaga keanekaragaman hayati dan mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam baik darat maupun laut.
- (4) Mengembangkan produk dan atau jasa keuangan

dan atau non keuangan yang menerapkan prinsip berkelanjutan.

Adapun prinsip keuangan berkelanjutan diantaranya. Prinsip Pengelolaan Risiko yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial dalam manajemen risiko LJK. Prinsip Pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan yang bersifat inklusif. Prinsip Tata Kelola pada aspek lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial termasuk didalamnya adalah pelaporan berkelanjutan (Sustainability Report), dan Prinsip Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Kolaboratif untuk menciptakan sinergi dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan.

C. Tanggung jawab kepada pemegang saham dan masyarakat

Stakeholder merupakan kelompok kepentingan atau beberapa kelompok orang yang berkepentingan dengan perusahaan, yang dapat mempengaruhi jalannya perusahaan secara keseluruhan atau yang dapat terkena dampaknya. Pemangku kepentingan dikelompokkan menjadi dua bagian: pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal. Pemangku kepentingan internal meliputi organisasi/industri itu sendiri, pemegang saham, pemilik bisnis, dan karyawan (Widyastuti, 2019). Namun, pemangku kepentingan eksternal mencakup konsumen, pemasok, pesaing, investor, pemerintah, komunitas lokal di wilayah tersebut, media dan masyarakat pada umumnya.

Tanggung jawab perbankan terhadap masyarakat dan pemegang saham melibatkan

beberapa aspek yang penting. Berikut adalah tanggung jawab utama perbankan terhadap keduanya.

1. Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat

Pemberian Layanan yang Adil dan Bermutu: Perbankan bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang adil, bermutu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini termasuk menyediakan produk dan layanan perbankan yang memenuhi standar keamanan, ketersediaan, dan keandalan.

Mendukung Pertumbuhan Ekonomi: Perbankan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses terhadap modal melalui pinjaman kepada individu, bisnis, dan lembaga.

Penyuluhan Keuangan: Bank-bank memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi dan informasi yang diperlukan kepada masyarakat tentang manajemen keuangan, investasi, dan akses terhadap layanan keuangan.

Kepatuhan Regulasi: Perbankan harus mematuhi semua regulasi yang berlaku dan menjaga keamanan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

2. Tanggung Jawab Terhadap Pemegang Saham

Menghasilkan Keuntungan yang Wajar: Sebagai perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham, bank memiliki kewajiban untuk menghasilkan keuntungan yang wajar dan memberikan return yang memadai kepada pemegang saham (Munzir et al., 2021, 2023).

Transparansi dan Akuntabilitas: Bank harus memberikan laporan keuangan yang jelas dan transparan kepada pemegang saham, serta

menjalankan praktik manajemen yang akuntabel untuk memastikan pengelolaan dana yang efisien.

Pertimbangan Risiko: Bank memiliki tanggung jawab untuk mengelola risiko dengan baik, termasuk risiko kredit, operasional, dan kepatuhan, demi melindungi kepentingan pemegang saham.

Kepatuhan Hukum dan Etika Bisnis: Perbankan harus beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku dan menjalankan bisnis dengan standar etika yang tinggi, memastikan bahwa kepentingan pemegang saham tidak terancam oleh tindakan yang meragukan atau melanggar hukum. Dalam menjalankan tanggung jawab terhadap masyarakat dan pemegang saham, perbankan perlu menjaga keseimbangan antara keuntungan yang dihasilkan dengan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat secara umum, serta menjaga kepercayaan dan kepuasan pemegang saham dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- (OJK), O. J. K. (2019). *Buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. OJK.
- Adams, L. B. (2013). The Emergence of Banking Institutions: Lessons from the Past Decade. *Journal of Economic Development and Innovation*, 17(1), 23-40.
- Adha, S. N., & Riwayati, H. E. (2019). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Penyaluran Kredit Perbankan (Studi pada Bank Umum Milik Negara). *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 3(1), 106-117. <https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v3i1.124>
- Adrian Sutedi, S. H. (2022). Hukum keuangan negara. Sinar Grafika.
- Agus Triansyah, F., Ayu Suryaningrum, D., Trihudyatmanto, M., Pranata Mulya, N., Gultom, A. W., Sismar, A., Munzir, M., Rusliana Muhamad Saleh, E., Lintang Rachmadana, S., Pahmi, P., Amam, A., & Sabaria, S. (2023). STUDI KELAYAKAN BISNIS (Vol. 1).
- Agustin, N., Tristiarini, N., Hernawati, R. I., & Durya, N. P. M. A. (2023). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar Terhadap Harga Saham Perusahaan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Terapan Akuntans*, 7(1), 65-77.
- Aini, H. S. (2019). *Penyaluran Kredit Pada Bank Bri Unit Lalabata Rilau*. 2(April), 71-79.
- Ajija, S. R., Fathia, M., & Suarni, A. (2010). Tawarruq: Issue & Challenge. Kuala Lumpur: IIUM.

- Al-Amaren, E. M., Ismail, C. T. B. M., & Nor, M. Z. B. M. (2020). The blockchain revolution: A gamechanging in letter of credit (L/C). *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(3), 6052-6058.
- Amarodin, M. (2014). Peran Ekonomi Makro dan Mikro di Indonesia. *Eksyar*, 01(02), 197-214.
- Anggraini, R. A. (2021). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Penyaluran Kredit pada Bank Konvensional Periode 2015-2019. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(3), 1048-1059. <https://doi.org/10.26740/jim.v9n3.p1048-1059>
- Annual Report Bank Mandiri 2023
- Annual Report Bank Muamalat 2022
- Ariani, S. E. (2023). DISTRIBUSI PENDAPATAN. *PENGANTAR ILMU EKONOMI*, 59.
- Asdar, A., Adiningrat, A. A., Rahmah, S., Wahyuni, S., & Suarni, A. (2020). IMPRESI MAHASISWA FEB PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) TERHADAP TINGKAT MINAT MENABUNG DI PERBANKAN SYARIAH DENGAN PERBANKAN KONVESIONAL KOTA MAKASSAR. *Jurnal Mirai Management*, 5(3), 340-356.
- Astika, S., & Suarni, A. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar. *Jurnal Ar-Ribh*, 1(1), 92-111
- Azizah, R. S. N., Zahra, A. A., & Nurdiansyah, D. H. (2022). Analisis Manajemen Risiko Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *E-Qien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(3), 1125-1138.

- Bank for International Settlements. (2020). Cyber Resilience in Financial Institutions. Committee on Payments and Market Infrastructures, Bank for International Settlements.
- Berliandaldo, M., Chodiq, A., & Fryantoni, D. (2021). Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong. *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 4(2), 221-234.
- Brown, C. D. (2018). Banking and Economic Growth: A Historical Analysis. *Journal of Economic Development*, 25(3), 89-105.
- Chen, H. W. (2011). Banking and Economic Transformation: A Longitudinal Study. *International Journal of Economic Development*, 28(1), 109-125.
- Chorun Nisa, M. (2022). PEMIKIRAN IBRAHIM M. ABU-RABI': TELA'AH KRITIS PASCA 11 SEPTEMBER MENGENAI SEJARAH ISLAM MODERN. *Soeloeh Melajoe: Jurnal Peradaban Melayu Islam*, 1(2), 80-94.
- Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999
- Dewi, S. R. (2019). Peran Perbankan dalam Pembangunan Ekonomi Lokal. Yogyakarta: Pustaka Jaya.
- Dewi, S., Yaswirman, Y., Helmi, H., & Henmaidi, H. (2023). PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA. *Jurnal Pajak Dan Bisnis*, 4(2), 229-241.
- Dian Putri Agustina, M., Hakim Aziz, L., Ihwanudin,

- N., Moridu, I., Rumondang Damanik, E., Kristanto, T., Irwansyah, R., Astuti, E., Afifah, D., & Basyariah, N. (2020). *ETIKA BISNIS* (Vol. 1). www.penerbitwidina.com
- Dr. Darmawan, M.A.B., CFRM, *Manajemen Investasi Dan Portofolio*, Jakarta: Bumi Aksara, 2022
- Dr. H. Asli Nuryadin, S.pd., MM, *Manajemen Perusahaan*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2009
- Dr. H. M. Arifin *Hukum Perbankan Syariah* Prenada Media pada tahun 2019.
- Dr. H. M. Arifin, *Hukum Perbankan Syariah* Prenada Media pada tahun 2022.
- Dr. H. M. Arifin, *Hukum Perbankan Syariah* Prenada Media pada tahun 2023.
- Dr. Sentosa *Hukum Perbankan di Indonesia*, CV. Mandar Maju 2018
- Dr. Sentosa *Hukum Perbankan Indonesia* CV. Mandar Maju 2020
- Dr. Sentosa *Hukum Perbankan Indonesia* CV. Mandar Maju pada tahun 2023.
- Dr. Sentosa *Hukum Perbankan Indonesia"* CV. Mandar Maju pada tahun 2022.
- Dr. Sentosa, *Hukum Perbankan Indonesia* CV. Mandar Maju pada 2019
- Dr. Sentosa, *Hukum Perbankan Indonesia* CV. Mandar Maju pada tahun 2021.
- Effendi. *Asas Manajemen*. Jakarta PT rajag Rafindo Persada 2014
- Faisal, A. U. A. R., Suarni, A., & Sahib, M. K. (2023). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabah Terhadap Profitabilitas BTM Al-Kautsar Kota Makassar 2016-2022: The Influence Of Mudharabah And Murabah Financing On The Profitability Of BTM Al-*

- Kautsar Makassar City 2016-2022. *Journal Of Accounting, Management, Economics, And Business (ANALYSIS)*, 1(3), 161-171.
- Freixas, Xavier, Rochet Jean-Charles. 1997. *Microeconomics of Banking*. Cambridge, UK.
- Fuadi, F. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori dan Aplikasi)*. Penerbit Adab.
- Garcia, M. L. (2017). The Role of Banks in Shaping Economic Landscapes: Lessons from the Past. *International Journal of Banking Studies*, 12(1), 34-50.
- Haanurat, I., Haliding, S., & Suarni, A. (2011). Manajemen Islam Perusahaan: Model Dan Praktis. *J Ilmu Ekon Balanc*, 7(2), 102-115.
- Hadi Ismanto, dkk. *Perbankan Dan Literasi Keuangan*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019
- Hariyono, *Prinsip dan Teknik Manajemen Kekayaan Negara*, Jakarta:
- Harsono, M. (2017). *Dinamika Keuangan Nusantara: Studi Kasus pada Sistem Keuangan Tradisional*. Surabaya: Genta Pustaka.
- Hasoloan, A. (2018). PERANAN ETIKA BISNIS DALAM PERUSAHAAN BISNIS. *Jurnal Warta*, 57.
- Hayati, N., Yulianto, E., & Syafdinal, S. (2020). Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 6(1), 1633-1652.
- Hidayat, L. R., Setyadi, D., & Azis, M. (2018). Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga dan Nilai Tukar Rupiah serta Jumlah Uang Beredar terhadap Return Saham. *Forum Ekonomi*, 19(2), 148.

- <https://doi.org/10.29264/jfor.v19i2.2121>
- Ibrahim, B. (2018). Inovasi dan Transformasi: Evolusi Lembaga Keuangan Modern di Indonesia. Bandung: Karya Pusaka.
- Ismamudi, I., Hartati, N., & Sakum, S. (2023). Peran Bank dan Lembaga Keuangan dalam Pengembangan Ekonomi: Tinjauan Literatur. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(2), 35-44.
- Jacob, J., & Waibot, Z. (2022). Mengukur Output Gap Ekonomi Maluku Utara (Pendekatan Hodrick-Prescott Filter). *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 2(2), 212-221. <https://doi.org/10.11594/jesi.02.02.09>
- Jatmiko, D. S. S. K., Djatnika, D., & Setiawan, S. (2021). Ketahanan bank umum syariah di Indonesia terhadap fluktuasi makroekonomi dalam negeri dan suku bunga dana federal reserve. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(2), 349-361.
- Johnson, A. R. (2019). Early Development of Financial Systems: Insights from Archaeological Discoveries. *Economic Perspectives*, 8(4), 112-128.
- Karyanto, B., & Martiana, R. (2020). PERAN AKUNTAN DAN PERUSAHAAN MENUJU TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS / SDGs) 2030. *Jurnal Studia Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 15-30. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/12/sustainable->
- Kasmir, Dasr-Dasar Pengkreditan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015
- Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

- Kasmir. 2015. *Manajemen Perbankan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Kasmir. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Khasanah, L. A. (2021). MODEL EOQ UNTUK BARANG YANG MUDAH RUSAK YANG MENGALAMI PENURUNAN MUTU DENGAN MASA PAKAI MAKSIMUM, PEMBAYARAN DIMUKA, DAN PERMINTAAN BERGANTUNG PADA IKLAN (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Kim, Y. J. (2012). Financial Revolution and the Birth of Banking: A Historical Analysis. *Financial History Quarterly*, 14(4), 67-82.
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2021). Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 4(2), 141-163. <https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3044>
- Lestari, D. (2018). Siklus Bisnis, Kepemilikan Terkonsentrasi, Leverage, dan Kinerja Perusahaan. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(23), 56-67.
- Lestari, E. P. (2011). Intensitas Perdagangan Dan Keselarasan Siklus Bisnis di ASEAN-4 dan Uni Eropa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(2), 163-186.
- Lubis, Pardamean, & Zulam, Salman Bin. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Permintaan Investasi Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2(2), 147-166. <https://doi.org/10.24815/jped.v2i2.6691>.
- Maronrong, R. M., & Nugrhoho, K. (2019). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Dan Nilai Tukar Terhadap Harga Saham Studi Kasus Pada Perusahaan

- Manufaktur Otomotif Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012- 2017. *Jurnal STEI Ekonomi*, 26(02), 277-295.
<https://doi.org/10.36406/jemi.v26i02.38>
- Maulidan, M. I., Badruzzaman, F. H., & Harahap, E. (2020). Analisis Harga Keseimbangan Pasar Pada Titik Koordinat Market Equilibrium Price Analysis At Coordinate Points. *Jurnal Matematika*, 19(2), 1-6.
- Maulidya, G. P., & Afifah, N. (2021). Perbankan Dalam Era Baru Digital: Menuju Bank 4 . 0. *Proceeding Seminar Bisnis Seri V*, 278-288.
- Mourine, A., & Septina, F. (2023). Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar, dan Struktur Modal terhadap Return Saham Perusahaan Sektor Farmasi. *Jurnal Perspektif*, 21(1), 10-20.
<https://doi.org/10.31294/jp.v21i1.12943>
- Munir Fuady *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 Buku Kesatu*, Rajawali Pers 2018
- Munzir, M., Andriyan, Y., & Hidayat, R. (2023). Consumer Goods: Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dimediasi oleh Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(2), 153-165.
<https://doi.org/10.24853/jago.3.2.153-165>
- Munzir, M., Rini, T. H. C., & Azis, M. (2021). Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Citra Perusahaan. *Balance Vocation Accounting Journal*, 5(1), 1-11.
- Na'afi, S., & Purwanti, A. (2023). Operasi Bisnis Transnasional dan Pembangunan

Berkelanjutan: Eksplorasi Bibliometrik tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Praktik Etis, dan Dampak Lingkungan. *Jurnal Bisnisman: Riset Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 11-24.

Nasution, H. S. (2023). *Sejarah Islam Asia Tenggara*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

Nila Firdausi Nuzula, Ferina Nurlaily, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020

Octaviani, Santi, & Komalasarai, Dahlia. (2017). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Dan Solvabilitas Terhadap Harga Saham (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi.*, 3(2), 77-89.

Ompusunggu, D. P., Sutrisno, D. R. I., & Hukom, A. (2023). Konsistensi Dan Efektivitas Peran Lembaga Keuangan Non Bank (Koperasi Simpan Pinjam) Sebagai Penggerak Perekonomian Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(1), 689-696

Paramita, R. (2021). Efektivitas Kebijakan Fiskal Dan Kebijakan Moneter Dalam Mengatasi Inflasi Di Indonesia Periode 1984-2019. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 6(1), 152-168.
<https://doi.org/10.22212/jbudget.v6i1.85>

Pardamean, A. T. (2020). Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia. *Quantitative Economics Journal*, 2(3), 126-136.
<https://doi.org/10.24114/qej.v2i3.17434>

- Patel, R. K. (2015). Historical Perspectives on Banking and Economic Progress. *Economic History Review*, 22(4), 112-129.
- Peter S. Rose and Sylvia C. Hudgins. 2005. *Bank Management & Financial Services*. McGraw-Hill. Boston.
- Polihu, H. A., Rotinsulu, T. O., & Mandei, D. (2023). Analisis Pengaruh Suku Bunga Kredit Dan Inflasi Terhadap Permintaan Kredit Konsumsi Di Sulawesi Utara Tahun 2012 – 2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(8), 85-96.
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Pratiwi, D. A. (2016). *Perkembangan Sistem Keuangan Mikro: Studi Kasus dari Desa-desa Jawa*. Jogjakarta: Cendekia Press.
- Putra, I. G. A. (2015). *Revolusi Digital dalam Perbankan: Tantangan dan Peluang*. Denpasar: Bali Media.
- Ra'idah, A., & Abadi. (2014). SIKLUS EKONOMI MODEL GOODWIN BERDASARKAN RELASI WORKERS SHARE DAN EMPLOYMENT RATE DI INDONESIA. *MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika*, 3(2), 1-8.
- Rahardjo, T. B. (2012). *Pemberdayaan Ekonomi Melalui Inklusi Keuangan: Perspektif Sejarah*. Semarang: Cahaya Ilmu.
- Raharjo, B. (2021). *Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-299.
- Rahmayati. (2022). *Percepatan Pengembangan Ekosistem Sektor Jasa Keuangan*. 4(2), 181-194.

- Ramadhani, T. R., Brawijaya, A., & Aziz, I. A. (2021). Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Di Bank Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 14-31.
- Raspita, D. (2021). Peranan Transaksi Perdagangan Luar Negeri dan Endosemen dalam Produktivitas dan Perekonomian. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 1-10.
- Rinaldy, E., Ikhlas, D., & Utama, A. (2021). *Perdagangan Internasional: Konsep dan Aplikasi*. Bumi Aksara.
- Robinson, P. S. (2016). Financial Innovations and the Modern Banking Sector. *Contemporary Finance Review*, 19(3), 78-94.
- Rosmini, R., & Suarni, A., (2019). Analisis Perbandingan Rasio Keuangan Antara Bank Konvensional Dan Bank Syariah (Studi Kasus Pt Bank Panin Tbk Dan Pt Bank Panin Dubai Syariah Tbk Periode 2014-2016). *Jurnal Ar-Ribh*, 2(1), 102-116.
- Salim, E. (2020). *Pembangunan Berkelanjutan*.
- Salmaa, A. S., & Isnaini, E. N. (2022). JEMATANSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi). *Jurnal JEMENTASI (Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi)*, 1(1), 1-6. <https://jurnal.pptq-annaafi.org/index.php/jematansi>
- Santoso, B. (2014). *Transformasi Kelembagaan: Perjalanan Panjang Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Abadi.
- Smith, J. (2022). The Evolution of Financial Institutions: A Comprehensive Review. *Journal of Financial History*, 15(2), 45-62.

- Suarni, A., Hamid, F. A., & Ghazali, N. A. M. (2020). Intellectual Capital Disclosure In Annual Reports Of Islamic Banks: A Comparative Study Of Malaysia And Indonesia. In ICBAE 2020: Proceedings Of The 2nd International Conference Of Business, Accounting And Economics, ICBAE 2020, 5-6 August 2020, Purwokerto, Indonesia (P. 229). European Alliance For Innovation.
- Suarni, A., Kasim, M. N., & Febriana, A. (2023). PENGARUH KUALITAS LAYANAN PENGADAIAN SYARIAH TERHADAP LOYALITAS NASABAH DI KOTA MAKASSAR. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 6(2), 68-77.
- Subagja, A. D. (2020). Letter of Credit (L/C) Sebagai Cara Pembayaran yang Paling Aman dalam Transaksi Pembayaran Perdagangan Internasional/Ekspor-Impor.(Studi Kasus pada PT. San San Saudaratex Jaya). *International Journal of Demos*, 2(1), 78-89.
- Sukarno, A. (2022). *Sejarah Perkembangan Keuangan Indonesia: Dari Era Kolonial hingga Kemerdekaan*. Jakarta: Penerbit Nusantara.
- Sukma, F. D., & Ismail, I. (2023). EVOLUSI RELEVANSI ETIKA BISNIS DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR). *JURNAL LENTERA BISNIS*, 12(3), 935-949. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v12i3.994>
- Supardi, E. (2021). *Ekspor Impor Perdagangan Internasional (Ekspor-Impor), Masalah-Masalah Di Dalam Kegiatan (Ekspor-Impor), Para Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Ekspor-Impor, Metode Pembayaran Dalam Perdagangan Internasional*. Deepublish.

- Suretno, S., & Bustam, B. (2020). Peran bank syariah dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui pembiayaan modal kerja pada UMKM. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), 1-19
- Syafira, A. A. (2023). Pelaksanaan Perjanjian Ekspor Impor Pestisida Dengan Metode Pembayaran Kemudian (Open Account) dalam Perspektif Hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 576-584.
- Thayib, S. R. T., & Inaku, I. N. (2022). Manajemen Risiko Keuangan Bank Pada Kasus Penempatan Dana Nasabah Di Maybank. *Manajemen Keuangan Syariah*, 2(2), 79-85. <https://doi.org/10.30631/makesya.v2i2.1346>
- Widyastuti, S. (2019). SEBUAH SINTESIS PADA LITERATUR: STRATEGI INTERVENSI PEMASARAN HIJAU MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. *Jurnal Riset Bisnis*, 2(2), 83-94.
- Wijaya, K. P. (2013). Dampak Globalisasi Terhadap Lembaga Keuangan Lokal. Surakarta: Mitra Budaya.
- Wiratama, A. S. (2011). Pola Evolusi Lembaga Keuangan: Studi Kasus Indonesia. Jakarta: Penerbit Maju Sejahtera.
- Wong, E. T. (2014). Modern Financial Systems: Challenges and Opportunities. *Journal of Financial Innovation*, 31(2), 56-71.
- World Economic Forum. (2020). The Future of Financial Services: How Disruptive Innovations are Reshaping the Way Financial Services are Structured, Provided and Consumed. Retrieved from

http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_future_of_financial_services.pdf

- Xaverius, F. L. A. (2019). *Pengantar Intermediasi Keuangan: Konsep, Teori dan Pembahasan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Yuliani, S., & Anita, W. F. (2023). PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS CONSIGNMENT SALES PIHAK CONSIGNOR PADA PT. MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK PERIODE 2021. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 9(1).
- Yumanda, F. C., & Juliannisa, I. A. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri di Indonesia. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 6(2), 133-152.
- Yumetri Abidin, Y. (2022). BUKU: PENGANTAR EKONOMI INTERNASIONAL.
- Zainal Asikin *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers 2018
- Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus. 2004. *Essentials of Investments*. McGraw-Hill. Boston.

BIOGRAFI PENULIS



Nurhafiani, lahir di Lubuk Gadang, 30 Agustus 1996. Anak dari pasangan suami istri, Ibu Zukro dan Ayah (Alm) Jamaluddin. Pernah menempuh pendidikan S1 Akuntansi Syariah dan S2 Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan. Saat ini, bekerja sebagai dosen pada program studi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Tulang Bawang Lampung. Saya memiliki minat yang kuat dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, yang mencerminkan dedikasi terhadap dunia pendidikan. Membagikan pengetahuan dengan orang lain melalui pengajaran dan penelitian. Selain berkarir sebagai dosen, peneliti, dan *Pers*, saya juga hobby menulis. Kecintaan terhadap tulis-menulis dimulai sejak tahun 2017. Saya mulai aktif bergabung dalam berbagi komunitas menulis. Buku pertama adalah buku antologi berjudul "*Hidden Love*". Namun, karya pertama saya dalam menulis buku bahan ajar adalah "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya". Buku ini menunjukkan pengetahuannya yang luas tentang dunia keuangan dan dedikasinya untuk membagikan pengetahuan kepada sesama dosen dan mahasiswa. Selain itu, beberapa penelitian saya dipublikasikan pada jurnal nasional yang terakreditasi SINTA. Saya belajar menjadi contoh nyata dari perpaduan antara akademisi dan penulis, menggabungkan kecintaan pada penelitian

dan penulisan untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat dan dunia pendidikan. Saya terus berusaha untuk memperluas pengetahuan dan membagikan pengetahuan ini dengan orang lain melalui karya-karya yang saya tulis.



D. Muhamad Yamin, lahir di Lebak, December 01 1985. Penulis tinggal di Komplek Graha Pasir Ona Blok B 10 RT/RW 007/006 Rangkasbitung – Lebak. Penulis menimba ilmu pendidikan tinggi tingkat sarjana di Institut Teknologi Indonesia tahun 2004 – 2009, dan Magister di La Tansa Mashiro tahun 2013–2015. Kegiatan sehari-hari penulis yakni mengajar di program S1 Universitas La Tansa Mashiro.

Phone: 08 777 888 1946

E-mail : dmuhamadyamin@gmail.com



Agusdiwana Suarni, SE., M.Sc. Acc. Seorang penulis dan dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Makassar di Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Selain mengajar aktif dalam menulis artikel baik secara Nasional dan International. Telah banyak jurnal yang telah diterbitkan dan fokus riset sekarang ini adalah Keuangan Masjid, Lembaga keuangan syariah dan Akuntansi Syariah. Telah menyelesaikan S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar jurusan Akuntansi, dan S2 Master of

Accounting di *International Islamic University Malaysia* (IIUM) dan sekarang ini menempuh studi S3 di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) di Fakulti Economics and Muamalah (FEM). Mata Kuliah yang diajarkan Akuntansi Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Kewirausahaan, dan Pengantar Akuntansi 1 dan 2.



Moh. Ery Kusmiadi. Penulis Lahir di Baralau Kec. Monta Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat Pada Tanggal 28 April Tahun 1994. Pada Tahun 2015 Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar dan banyak menekuni di bidang Hukum, Perdata, Hukum Perjanjian dan Hukum Adat. Pada tahun 2017 lulus Magister di Bidang Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, selain menekuni bidang hukum, Penulis Juga meminati bidang Perbankan dan Etika Bisnis, Dan Sejak tahun 2020 hingga sekarang menjadi Pengajar tetap di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah UNIMUDA Sorong.



Euis Ajizah, SE., MM. Lahir di Ponorogo, 29 Februari 1984, anak ke empat dari enam bersaudara, lahir dari pasangan Hj. Mujiatin dan H. Efendi, bersama pasangan (suami) Desrian Dwi Senjari, dikaruniai anak: Azkayra Adreena Mashel, Miqdam Abqary Shuan, Adzkia Nur Sabila. Penulis menyelesaikan

pendidikan S1 Program Studi Manajemen, konsentrasi Manajemen Keuangan pada tahun 2007 dan Program Studi S2 Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Keuangan, linear dengan relevansi akademik saat S1, lulus pada 2012 di STIE La Tansa Mashiro (Universitas La Tansa Mashiro). Saat ini aktif sebagai dosen tetap Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas La Tansa Mashiro. Selain sebagai dosen tetap yayasan, penulis juga sebagai Sekretaris Program Studi S2 Manajemen pada Universitas La Tansa Mashiro dan juga sebagai Kepala SDM di Universitas La Tansa Mashiro.



Nama lengkap Imelda Virgula Wisang, SE., M.M. lahir di Kupang, 06 Oktober 1981. Anak dari ayah Drs, Paulus Leo Wisang (alm) dan Ibu Maria Angglusia Goetha, putri ke-2 dari tiga bersaudari. Agama katolik. Alamat penulis Jln Anyelir

IV No 117 Rt/Rw 005/002 Perumnas Maumere, penulis pertamakali bersekolah di Taman Kanak-Kanak St, Yoshep Kupang Tahun 1987, Sekolah Dasar Negeri Oebobo Kupang Tahun 1993, SLTP Katolik Virgo Fidelis Maumere Tahun 1996, Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Maumere Tahun 2000, penulis melanjutkan Sarjana Strata 1 pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Tahun 2005, dan melanjutkan pendidikan Akta Mengajar pada Universitas Nusa Cenda Kupang Tahun 2010, pernah menjadi guru pada SMK St. Mathildha Maumere tahun 2010-2014, dan melanjutkan Magister Manajemen di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang tahun 2017. Dan sekarang penulis

berprofesi sebagai dosen di program studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa Maumere sejak tahun 2018 samapai sekarang.



Kartika Novitasari, S.Pd., M.E., Lahir di Kuningan, 04 Januari 1995. Anak pertama dari tiga bersaudara. Pada tahun 2013 Melanjutkan S1 Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Semarang lulus tahun 2017. Pada tahun 2020 melanjutkan

Pendidikan ke jenjang S2 bidang Ekonomi Syariah dan lulus tahun 2022. Bekerja sebagai Dosen Program Studi Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Al Bahjah Kota Cirebon sampai saat ini, tidak hanya sebagai dosen tetapi juga pengelola OJS ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Al Bahjah Kota Cirebon.



Siti Mudawanah, lahir di Kabupaten Lebak Banten, Putri ketujuh dari delapan bersaudara dari Bapak M. Soleh dan Ibu Eni. Menyelesaikan Pendidikan dari SD s.d S1 di Kota Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten. Melanjutkan Pendidikan S2

Akuntansi di Universitas Budi Luhur. Kegiatan sehari-hari mengajar di program S1 Universitas La Tansa Mashiro. Saat ini menjadi Dosen Tetap Yayasan sekaligus menjabat sebagai staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas La Tansa Mashiro. Menjadi tim

editor di jurnal *The Asia Pacific Journal Of Management Studies* dan editorial board di *Basic and Applied Management Research Journal (BAMRJ)*. Penelitian yang berhasil di danai Kemenristekdikti Tahun 2021 Penelitian Dosen Pemula dengan judul implikasi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Latar Belakang Sosial Ekonomi Terhadap Minat Calon Mahasiswa Program Studi Akuntansi STIE La Tansa Mashiro dalam Keberlanjutan Perguruan Tinggi. Adapun karya buku tahun 2023 yang telah di tuliskan yaitu *Book Chapter* Pengantar Akuntansi Bab 11. Interpretasi Laporan Keuangan, Teori Ekonomi Bab 1. Pendahuluan, Statistika Dasar Bab 15. Penerapan Metode Statistika Dalam Penelitian. Manajemen Keuangan Bab 3. Nilai Waktu Uang dan Penilaian Investasi.



Munzir, S.E., M.Ak. Ketertarikan penulis untuk berkecimpung dalam dunia pendidikan berawal dari motivasi hidup untuk banyak memberi manfaat dan mengamalkan ilmu pengetahuan sebagai amalan jariah.

Menyelesaikan studi S1 di Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palopo pada Tahun 2016. Satu tahun merintis karir di perusahaan sebagai Tenaga Ahli Keuangan, 2017 melanjutkan studi S2 di Prodi Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kota Solo dan menyelesaikan studi pada Tahun 2019. Penulis memiliki konsentrasi dibidang Akuntansi. Dalam mewujudkan karir sebagai dosen profesional di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA)

Sorong, penulis pun aktif sebagai peneliti sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni. Pendampingan ke beberapa Instansi, UMKM dan Yayasan. Penulis memiliki motto “Berbakat, maka Banyaklah bermanfaat”.